

**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN DISPARITAS
PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO
JAWA TIMUR TAHUN 2016-2019**



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2022**

**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1**



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku.



Yogyakarta, 31 Maret 2022

Penulis,



Affrizal Syaiful Fathoni

PENGESAHAN

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR TAHUN 2016-2019

Nama : Affrizal Syaiful Fathoni

No Mahasiswa : 15313093

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 11 Mei 2022

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing (disetujui untuk ujian)



Suharto.,S.E.,M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR
KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR 2016-2019**

Disusun Oleh : **AFFRIZAL SYAIFUL FATHONI**


Nomor Mahasiswa : **15313093**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Jumat, 24 Juni 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Suharto,,S.E., M.Si.**

Penguji : **Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev.**



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Affim, S.E., M.Si., Ph.D., CFA

MOTTO

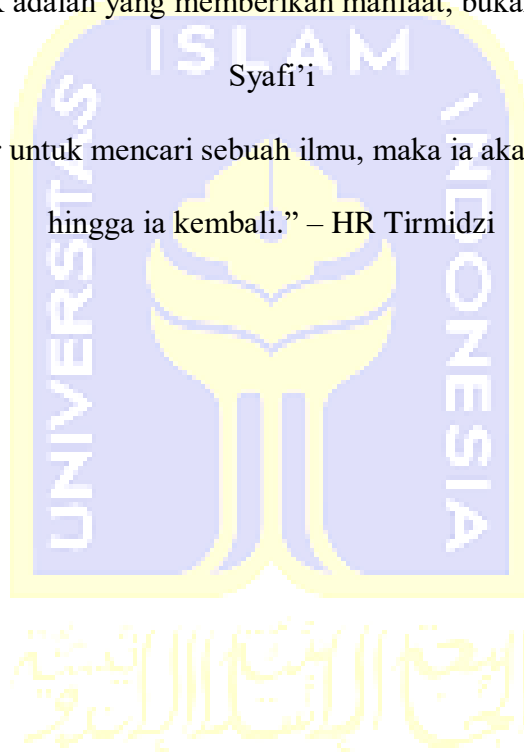
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” – QS Al Baqarah

286

"Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja, Tuhan ialah
sebaik-baiknya sutradara."

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.” – Imam
Syafi'i

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah
hingga ia kembali.” – HR Tirmidzi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hikmah-Nya sehingga saya dapat dimudahkan dan dilancarkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala hormat, dan kerendahan hati serta ucap syukur tiada tara kepada Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agus Isa Anshori dan Ibu Sri Harmanti yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta selalu memberikan semangat dan nasehat kepada saya selama ini.
2. Kepada keluarga dan rekan-rekan yang selalu ada dan selalu memberikan nasehat dan mendukung dimanapun saya berada, untuk segala perhatian, semangat dan kasih sayang yang diberikan selama ini.
3. Kepada Dosen pembimbing Bapak Suharto,,S.E., M.Si. yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan masukan serta bimbingan dalam penulisan Skripsi.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridho, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “Analisis Sektor Unggulan dan Disparitas Pembangunan Antar Kecamatan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tahun 2016-2019” ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia pendidikan.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanannya selalu memberikan dorongan, bantuan material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Suharto,,S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan masukan serta bimbingan dalam penulisan Skripsi.
3. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M,Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Sahabuddin Sidiq, S.E., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomika Universitas Islam Indonesia
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Ilmu Ekonomi atas didikan dan bimbingan selama ini.

6. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang melayani keperluan akademik maupun non akademik dengan baik selama ini.
7. Semua rekan-rekan yang banyak memberikan saran, motivasi dan menjadi inspirasi buat penulis, terimakasih atas dukungannya selama ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa.



Yogyakarta, 31 Maret 2022

Affrizal Syaiful Fathoni

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara Ujian Akhir/Skripsi	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	xiv
Halaman Daftar Gambar	xv
Halaman Abstrak	xvi

Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka	7
2.2 Landasan Teori	11

2.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	11
2.2.2 Teori Pertumbuhan PDRB	13
2.2.3 Model Model Pertumbuhan Ekonomi	15
2.2.4 Metode Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi	17
2.2.5 Produk Domestik Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	18
2.2.6 Teori Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi antar Daerah	22
2.2.7 Teori Ketimpangan Ekonomi antar Daerah	22
2.3 Kerangka Berpikir	24

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	26
3.1.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	26
3.1.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.1.3 Metode Pengumpulan Data	26
3.2 Metode Analisis Data	26
3.2.1 Typologi Klassen	26
3.2.2 Indeks Ketimpangan Williamson	29
3.2.3 Indeks Location Qudient	30

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	31
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Ponorogo	31
4.1.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Ponorogo	31

4.1.1.2 Demografi	31
4.1.2 Neraca Regional	34
4.2 Indeks Williamson	50
4.2.1 Indeks Williamson 2016	51
4.2.2 Indeks Williamson 2017	52
4.2.3 Indeks Williamson 2018	54
4.2.4 Indeks Williamson 2019	55
4.3 Tipologi Klassen	57
4.3.1 Tipologi Klassen 2017	57
4.3.2 Tabel Tipologi Klassen 2017	58
4.3.3 Tipologi Klassen 2018	59
4.3.4 Tabel Tipologi Klassen 2018	60
4.3.5 Tipologi Klassen 2019	61
4.3.6 Tabel Tipologi Klassen 2019	62
4.4 Indeks LQ	64
4.5 Penentuan LQ dan IW	65
4.5.1 Penentuan LQ	65
4.5.2 Kreteria Williamson	66

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur, 2011-2021

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1. Klasifikasi Daerah Menurut *Typology Klassen*

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo 2016-2019

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo 2016-2019 (jiwa)

Tabel 4.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo 2016-2019 (miliar rupiah)

Tabel 4.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo 2015 (miliar rupiah).

Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo 2016-2019 (miliar rupiah)

Tabel 4.7 Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo

Tabel 4.8 Penyebaran Persentasi terkait PDRB atas Dasar Harga Berlaku Sesuai Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo (persen) 2016-2019.

Tabel 4.9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo (persen) 2016-2019.

Tabel 4.10 Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Ponorogo 2016-2019.

Tabel 4.11 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasar Harga Berlaku Kecamatan di Kabupaten Ponorogo 2016-2019 (juta rupiah).

Tabel 4.12 Pendapatan Per Kapita Kecamatan di Kabupaten Ponorogo 2016-2019 (rupiah).

Tabel 4.13 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2019 (miliar rupiah)

Tabel 4.14 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015 (miliar rupiah)

Tabel 4.15 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2016-2019 (miliar rupiah)

Tabel 4.16 Indeks Williamson 2016

Tabel 4.17 Indeks Williamson 2017

Tabel 4.18 Indeks Williamson 2018

Tabel 4.19 Indeks Williamson 2019

Tabel 4.20 Tipologi Klasen 2017

Tabel 4.21 Tipologi Klasen 2018

Tabel 4.22 Tipologi Klasen 2019

Tabel 4.23 Indeks LQ

Tabel 5.1 Kesimpulan Kriteria Klassen 2017-2019

Tabel 5.2 Kesimpulan Indeks LQ 2016-2019

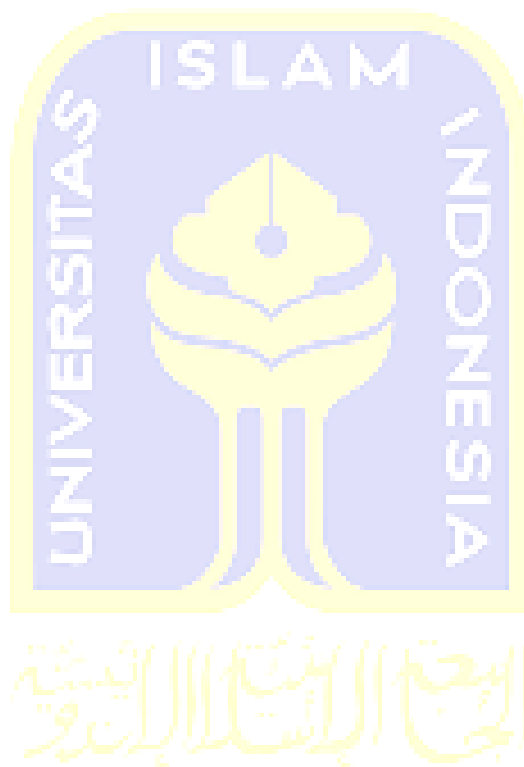


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Permintaan dan Penawaran Agregat di dalam Posisi Ekonomi Makro yang Seimbang

Gambar 2.2. Diagram Aliran Melingkar

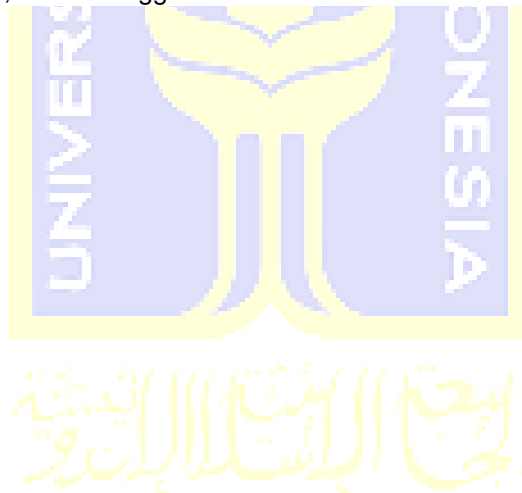
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran



Abstrak

Kecamatan di Kabupaten Ponorogo pertumbuhan ekonominya merupakan indikator dalam meninjau perkembangan pembangunan bisa dikelola melalui pertumbuhan ekonomi. Perbedaan tingkat pembangunan di kecamatan berpotensi memberikan pengaruh terkait perbedaan level kesejahteraan yang mengakibatkan kesenjangan. Tujuan penelitian ini mengetahui: 1) Ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson yang diukur dari PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Ponorogo periode 2016-2019, 2) Klasifikasi daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Ponorogo tahun 2016-2019, dan 3) Sektor unggulan berdasarkan *Indeks LQ* yang diukur dari PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2019. Metode penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu ketimpangan pembangunan kecamatan di Kabupaten Ponorogo periode 2016-2019. Jenis datanya sekunder yang didapat melalui data tidak langsung, Data diambil dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2016-2019 dalam juta rupiah yaitu: Tahun 2016: 18.989.394, 82; Tahun 2017: 20.336.293,85; Tahun 2018: 22.029.837,89; Tahun 2019: 23.524.897,58. Kesimpulannya Tahun 2017 daerah maju dan tumbuh pesat: Ponorogo, Siman, Kauman, Balong, Sambit, Sooko, Pudak. Daerah sedang tumbuh: Jenangan, Sampung, Badegan, Bungkal, Slahung, Ngrayun, Mlarak, Sawoo, Pulung, dan Ngebel. Daerah berkembang tidak ada, daerah tertinggal: Babadan, Sukorejo, Jetis. Tahun 2018 daerah maju dan tumbuh pesat: Jenangan, Kauman, Badegan. Daerah berkembang: Babadan, Sukorejo, Sampung, Balong, Bungkal, Slahung, Ngrayun, Mlarak, Sooko, Ngebel. Daerah berkembang Ponorogo, Siman, Sambit, Pudak. Daerah tertinggal: Babadan, Sukorejo, Jetis. Tahun 2019 daerah maju dan tumbuh pesat: Kauman, Pudak. Daerah sedang tumbuh: Babadan, Jambon, Bungkal, Slahung, Sambit, Sawoo, Ngebel. Daerah berkembang: Ponorogo. Daerah tertinggal: Siman, Sukorejo, Sampung, Badegan, Balong, Ngrayun, Mlarak, Jetis, Pulung, Sooko.

Kata kunci: PDRB, Klasen, Sektor Unggulan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan pada cakupan negara secara spasial tak selamanya berjalan secara terencana. Sebagian wilayah memperoleh pertumbuhan yang cepat namun di wilayah lainnya pertumbuhan terjadi cukup lamban. Pembangunan yakni sebuah mekanisme multidimensional dimana mengikutsertakan banyak transformasi mendasar pada tatanan sosial, institusi sosial, serta tingkah laku sosial. Selain akselerasi pertumbuhan ekonomi, penyetaraan disparitas pendapatan dan pengentasan kemiskinan, orientasi dari pembangunan yakni dan rangka mengoptimalkan kesejahteraan bagi masyarakat (Todaro, 2007:61). Sudah dibuktikan dengan tegas dimana pembangunan ekonomi yakni sebuah penggalan yang krusial dibandingkan pembangunan nasional yang ekstensif beserta orientasi akhir bagi mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang menarik serta penyebaran yang rata terkait pendapatan.

Berdasarkan pengamatan penulis dalam banyak kasus di negara berkembang contohnya di Negara Indonesia atau khususnya di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur sendiri tingginya pertumbuhan ekonomi selalu bertambah tak memusnahkan kesenjangan dengan sendirinya pada pembangunan. Secara umum disparitas pembangunan dialami pada dimensi pendapatan sektoral serta instruksi awal yakni berbentuk kelompok kaya yang makin kaya, sementara kaum miskin semakin miskin. Selain itu daerah yang maju secara terus-menerus berkembang semakin pesat jauh berbanding dengan daerah terbelakang serta eksistensi sektor unggulan yang turut andil dalam pembangunan sementara sektor dan unggulan menjadi beban.

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan di setiap wilayah atau daerah ialah dimensi yang secara general dialami pada aktivitas ekonomi suatu wilayah. Kesenjangan tersebut secara mendasar dikarenakan oleh eksistensi perbedaan pada cakupan sumber daya alam serta keadaan geografi yang ada di setiap dampak melalui perbedaan itu kapasitas sebuah daerah untuk memotivasi mekanisme pembangunan pun tidak sama. Dengan demikian tidak heran apabila masing-masing wilayah umumnya memiliki wilayah yang maju serta wilayah yang terbelakang. Adanya kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa implikasi atas derajat kesejahteraan masyarakat setiap wilayah. Dimensi kesenjangan pembangunan di setiap wilayah tersebut memiliki anjuran terkait perumusan kebijakan pada pembangunan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Tabel 1.1 merupakan gambaran Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur, 2011-2021

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur, 2011-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2011	219 727	5 388,97	14,27
2012	233 202	5 099,01	13,40
2013	257 510	4 805,01	12,55
2014	282 796	4 786,79	12,42
2015	305 171	4 789,12	12,34
2016	321 761	4 703,30	12,05
2017	342 092	4 617,01	11,77
2018	373 574	4 332,59	10,98
2019	397 687	4 112,25	10,37
2020	416 001	4 419,10	11,09
2021	429 133	4 572,73	11,4

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Jawa Timur

Dibutuhkan optimalisasi pertumbuhan serta penyebaran pendapatan setara bagi melakukan optimalisasi kesejahteraan. Cepatnya pertumbuhan ekonomi disetarakan dengan pemerataan berakibat pada disparitas wilayah, yakni bisa ditinjau melalui eksistensi wilayah yang maju serta yang terbelakang. Fenomena tersebut diakibatkan karena tidak ada perhatian terkait pertumbuhannya apakah lebih besar atau lebih kecil dari derajat penduduk yang tumbuh atau transformasi tatanan ekonomi wilayah.

Pada berbagai daerah tersebut tidak terjadi kesetaraan perkembangan sebab berbagai sumber dinilai masih minim serta kecenderungan investor untuk memutuskan wilayah perkotaan atau dengan sarana perhubungan, jaringan, jaringan baik telekomunikasi dan listrik, asuransi, tenaga kerja, dan serta mengembangkan yang

mumpuni disamping itu itu terkait eksistensi kesenjangan radio redistribusi pendapatan melalui pemerintah pusat terhadap daerah yang dibagi. Pertumbuhan ekonomi kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur menjadi sebuah indikator keberhasilan pengukuran pembangunan melalui PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Tingkat pendapatan daerah perkapita ialah indikator dalam menimbang kesejahteraan masyarakat. Pada mekanisme pembangunan ekonomi di sebuah wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan regional maka PDRB atau pertumbuhan ekonomi masih menjadi sebuah sasaran yang begitu penting serta perlu diperoleh.

Secara umum di awal pembangunan ekonomi pada sebuah wilayah perencanaan pembangunannya berorientasi dan fokus terhadap persoalan pertumbuhan. Di awal proses atau mekanisme tersebut pertumbuhan PDRB begitu juga untuk daerah seperti kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang total penduduknya cukup besar serta level pertumbuhan penduduknya cukup tinggi beserta pula fakta bahwa besarnya total penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur pertumbuhannya ialah sebuah indikator dalam meninjau perkembangan pembangunan yang bisa dikelola melalui pertumbuhan ekonomi (peningkatan PDRB). Perbedaan tingkat pembangunan di Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur berpotensi memberikan pengaruh perbedaan terkait level kesejahteraan setiap daerah Kecamatan yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan regional pada tiap daerah Kecamatan membesar.

Berdasarkan uraian tersebut kemudian diasumsikan adanya pertumbuhan PDRB serta penyelenggaraan pembangunan yang tidak setara pada setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur sebagaimana kapabilitas sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah kecamatan. Sebagaimana pada latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk menelaah masalah kedisparitas serta pertumbuhan ekonomi

kecamatan pada Ponorogo Jawa Timur berjudul **”Analisis Sektor Unggulan dan Disparitas Pembangunan antar Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Tahun 2016-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Melalui penjelasan latar belakang tersebut selanjutnya rumusan masalah pada penelitian ini yakni :

1. Bagaimanakah ketimpangan pembangunan berdasarkan Indeks Williamson yang diukur dari PDRB per kapita Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dalam periode tahun 2016-2019?
2. Bagaimanakah klasifikasi daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur tahun 2016-2019?
3. Bagaimanakah sektor unggulan berdasarkan *Indeks LQ* yang diukur dari PDRB Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dalam periode tahun 2016-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk:

1. Menganalisis klasifikasi daerah yang diukur dari pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dalam tahun 2016-2019.
2. Menganalisis ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson yang diukur dari PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dalam periode tahun 2016-2019.
3. Menganalisis sektor unggulan berdasarkan *Indeks LQ* yang diukur dari PDRB Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dalam periode tahun 2016-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Perolehan atas penelitian ini mampu digunakan menjadi:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

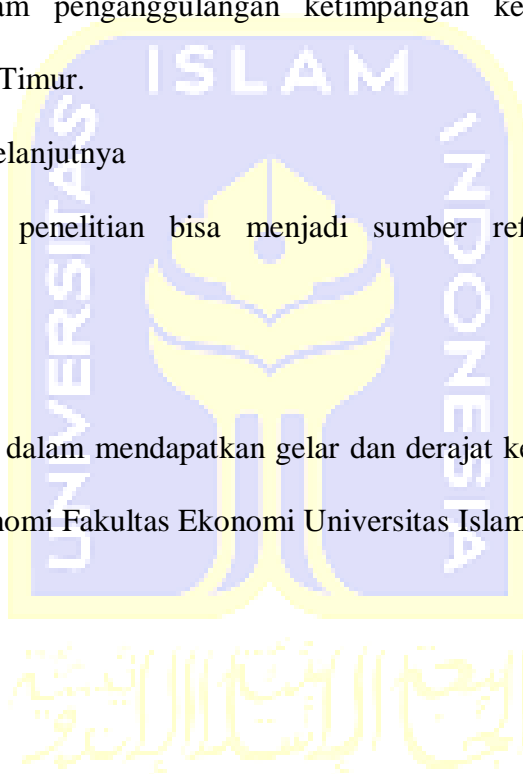
Penelitian yang diperoleh mampu menjadi sebagai bahan informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dalam menentukan kebijakan khususnya dalam penganggulan ketimpangan kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perolehan dari penelitian bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian berikutnya.

5. Bagi Peneliti

Sebagai kriteria dalam mendapatkan gelar dan derajat kesarjanaan pada program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Untuk mendukung penulisan laporan penelitian mengenai analisis sektor unggulan dan disparitas pembangunan antar Kecamatan, maka perlu dilakukan kajian-kajian terhadap penelitian sebelumnya karena memiliki hubungan dengan topik yang diteliti.

Astari Khairunnisa & Paidi (2017) dengan judul “Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi antar Kecamatan di Kota Medan”. Maksud penelitian ini dalam rangka menentukan pola pembangunan ekonomi masing-masing kabupaten, tingkat disparitas (ketimpangan) pembangunan ekonomi yang terjadi antar kabupaten, serta kebijakan sekaligus strategi yang tepat dalam pemecahan persoalan kesenjangan (ketimpangan) pembangunan ekonomi di Medan. Analisis Typologi Klassen, analisis Indeks Williamson, dan analisis deskriptif diterapkan disini. Hasil analisis Typologi Klassen selama periode 2001-2005 dan 2006-2010 mengklasifikasikan 3 kabupaten yang termasuk dalam kuadran I (maju cepat dan cepat berkembang), 5 kabupaten yang termasuk dalam kuadran II (maju tapi tertekan), 2 kabupaten termasuk dalam kuadran III (tumbuh cepat), 4 kabupaten yang termasuk dalam kuadran IV (relatif terbelakang) dan 7 kabupaten telah diubah pola pembangunan ekonominya. Analisis Williamson Index menunjukkan bahwa nilainya rendah dengan indeks rata-rata adalah 0,16994. Maka dari itu, kebijakan dan strategi yang dibutuhkan pada Pemecahan masalah ketimpangan atau disparitas yang ada di Medan.

Pamrihnan, Alit & Malik (2016) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Identifikasi Sektor Basis antar Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014”. Tujuan penelitian ini menganalisa dasar perekonomian serta derajat ketimpangan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2010-2014. Studi disini memanfaatkan data sekunder melibatkan Produk Domestik Regional Bruto (GRDP) dengan Harga Konstan tahun 2000, GRDP per kapita, Populasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Metode analisis menggunakan analisis Williamson Index, Theil Entropy Index, Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri cenderung menurun, tingkat ketimpangan tertinggi dialami wilayah Kecamatan Wonogiri dan tingkat ketimpangan pendapatan terendah terjadi di kecamatan Eromoko. Indeks Entropi Theil memperlihatkan terkait disparitas tiap kecamatan mengarah pada penurunan. Kecamatan Karangtengah memiliki ketimpangan pendapatan paling banyak sedangkan ketimpangan terendah adalah Kecamatan Purwanto. Komposit LQ (SLQ dan DLQ) menunjukkan bahwa Sektor Pertanian; Listrik, Gas dan Air; Perdagangan dan Komunikasi menjadi sektor dasar. Rekomendasi melalui kajiannya meliputi pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap dapat meningkatkan prasarana berupa jembatan, jalan, jaringan komunikasi, irigasi, serta yang lainnya. Kemudian Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu mengoptimalkan kapasitas ekonomi pada masing-masing kecamatan.

Restiatun (2009) dengan judul “Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan antar Kecamatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini bermaksud dalam rangka menelaah atau merinci sektor unggulan pada seluruh kecamatan di Provinsi DIY atau Daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian penelaahan kesenjangan pada Kabupaten pun dikaji pada penelitian ini dengan menerapkan pendekatan Tioplogi Klassen, Location Quotient, Indeks Entrppi Theil serta Williamson. Dari penelitian ini

membuktikan bahwa tendensi ketimpangan mengalami peningkatan setiap waktu kota Jogjakarta ada kategorisasi wilayah cepat maju serta tumbuh sementara kabupaten Bantul dan kulon Progo tercakup Pada kategori wilayah relatif terpencil. Kabupaten kulon Progo mengalami ketidakseimbangan dengan meningkat. Kemudian Sleman dan Gunung kidul tercakup Pada kategori wilayah dengan perkembangan yang cepat. Pendapatan perkapita paling tinggi dan paling rendah pada daerah Provinsi DIY.

Barika (2012) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kecamatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2005 - 2009”. Maksud dari pernyataan ini yakni dalam menela'ah berbagai faktor yang berdampak pada kesenjangan kecamatan di provinsi Bengkulu. Penggunaan variabel mencakup pertumbuhan penduduk, pengeluaran pemerintah, serta investasi swasta. Tujuan dari penelitian ini juga dalam mengisi skema pertumbuhan ekonomi berdasarkan tipologi klassen serta mendeskripsikan derajat ketimpangan wilayah pada Kabupaten serta wilayah di kabupaten/kota Provinsi itu. teknik analisis yang ditetapkan mencakup Analisis Klassen Tipologi Pertumbuhan Ekonomi, analisislah definisi serta kesenjangan Indeks Williamson. Bahwa nilai dari koefisien determinasi atau R^2 senilai 0,570, kemudian ada juga hasil (X2) atau pertumbuhan penduduk serta (X3) investasi swasta berdampak secara signifikan positif kepada ketimpangan daerah di Provinsi Bengkulu sedangkan (X1) atau pengeluaran pemerintah tak memiliki pengaruh.

Mopanga (2011) dengan judul “**Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo**”. Maksud dari penelitian ini yakni menelaah transformasi; ketidakseimbangan pembangunan sebagai hasil atas ketidakseimbangan alami adalah PDRB perkapita, indeks pembangunan manusia dan rasio belanja infrastruktur, wujud pengembangan korelasi dan disparitas pertumbuhan ekonomi serta memberikan rekomendasi kebijakan. Analisis ini menggunakan Indeks

Williamson, Tipologi Klassen, Gini, serta Shift-Share dan Regresi Panel. Peneliti memperoleh di mana walaupun pertumbuhan lebih rendah dari pada non pertanian namun masih ada dominansi atas pertanian pada tatanan ekonomi. Potensi sektor serta pertumbuhan ekonomi paling besar dialami wilayah sektor tersier maupun sekunder yang menunjukkan alterasi tekanan ekonomi pada Provinsi Gorontalo dalam periode 2001 hingga 2008. Gorontalo Kota serta Kabupaten Pohuwato daya saing tinggi tercakup pada Kuadran I di matriks tipologi kelas berupa penghasilan serta tingginya perkembangan, sedangkan Kabupaten Gorontalo, Boalemo, serta Bone Bolango pada Kuadran III berupa penghasilan dan pertumbuhan yang rendah. Dengan parsial dan simultan diferensiasi seluruh variabel independen secara substansial menjadi sumber pokok ketidakseimbangan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil	Perbandingan
				Persamaan dan Perbedaan
Restiatun (2009)	Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan antar Kecamatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993 - 2003.	<i>Location Quotient, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, dan Indeks Entropi Theil</i>	Kecondongan ketimpangan semakin meningkat setiap, kota Jogjakarta pada kategorisasi wilayah cepat maju dan tumbuh sementara kulon Progo serta kabupaten Bantul tercakup pada kategorisasi Daerah atau wilayah yang relatif terpencil. Selanjutnya selamat dan Gunungkidul tercakup pada kategorisasi wilayah dengan perkembangan yang cepat.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persamaannya terletak pada metode analisis data Location Quotient, Tipologi Klassen, Indeks Williamson ➤ Perbedaannya pada metode Indeks Entropi Theil
Barika (2012)	Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kecamatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2009	Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Penduduk, Investasi Swasta, dan Ketimpangan	Pertumbuhan Penduduk (X2) dan Investasi Swasta (X3) secara signifikan berdampak positif kepada disparitas Daerah di Provinsi Bengkulu. Sementara itu pengeluaran pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persamaannya pada pembahasan pertumbuhan penduduk ➤ Perbedaannya pada pengeluaran pemerintah dan investasi swasta

			(X1) tidak berpengaruh signifikan.	
Kurniasih (2013)	Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet	Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan	Terdapat dampak dari pertumbuhan ekonomi secara signifikan negatif kepada disparitas wilayah. Hasil lainnya memperlihatkan di mana hipotesis kuznets terkait tingginya pertumbuhan disertai oleh kesenjangan yang besar pada setiap wilayah ternyata tak berlaku pada Provinsi Kalbar.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persamaannya terdapat pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ➤ Perbedaannya terletak pada hipotesis Kuznet
Mopanga (2011)	Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo	Perubahan struktur ekonomi; ketidakseimbangan pembangunan yang dihasilkan dari ketidakseimbangan proporsional	Meskipun pertumbuhan contoh benda dari non pertanian namun pertanian masih mendominasi tatanan ekonomi. Potensi pertumbuhan serta sektor ekonomi paling besar ada pada wilayah sektor sekunder maupun tersier sebagaimana menunjukkan perputaran tatanan ekonomi pada Provinsi Gorontalo selama 2001 hingga 2008.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persamaannya pada perubahan struktur ekonomi dan ketidakseimbangan pembangunan ➤ Perbedaannya pada penggunaan analisis deskriptif <i>Shift Share</i>

(sumber diolah sendiri oleh peneliti)

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Definisi makro pertumbuhan ekonomi ialah penambahan PDRB yang juga bermakna sebagai penambahan PD atau Pendapatan Daerah. (Tambunan, 2001 : 2-3).

Konsep lain juga mengartikan bahwa pertumbuhan PDRB ialah sebuah mekanisme

kemajuan kapasitas produksi melalui sebuah perekonomian secara berkelanjutan atau berkesinambungan sekaligus ekstensif sepanjang waktu hingga memanifestasikan derajat pendapatan nasional yang semakin besar dari waktu ke waktu (Todaro, 2000: 371).

David Ricardo, Adam Smith, John Stuart Mill serta Thomas Robert mengutarakan konsep ekonomi klasik seperti Robert Solow dan Trevor Swan, dimana secara mendasar ada 4 hal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yakni a) banyaknya penduduk, b) banyaknya persediaan barang modal, c) aset alam serta luasnya tanah, d) penggunaan teknologi (Sukirno, 1985:275). Sebuah perekonomian dinyatakan terjadi pertumbuhan atau perkembangan apabila derajat kegiatan ekonomi lebih tinggi dibandingkan perolehan di masa sebelumnya.

Boediono (1985:1) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yakni mekanisme kenaikan output perkapita pada jangka panjang. Tuntutan dalam prosedurnya sebab masih Terdapat komponen dinamis. Teoritis ilmu ekonomi pembangunan saya ini terus melakukan penyempurnaan arti, konsep serta hakikat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak sebatas ditelaah melalui penambahan PDRB saja namun juga dikontribusikan dengan sifat material misalnya kepuasan, kebahagiaan, rasa nikmat, serta aman sebagaimana dirasakan oleh rakyat banyak (Arsyad, 1999: 141).

Kuznets (1955) yang sudah berjasa atau berkontribusi besar untuk memelopori analisis berbagai pola pertumbuhan historis diberbagai negara maju mengutarakan fase-fase pertumbuhan awal penyebaran pendapatan berpotensi buruk tetapi pada berbagai fase selanjutnya kian membaik. Pengamatan tersebut yang selanjutnya dikenal sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik (Todaro, 2000:207).

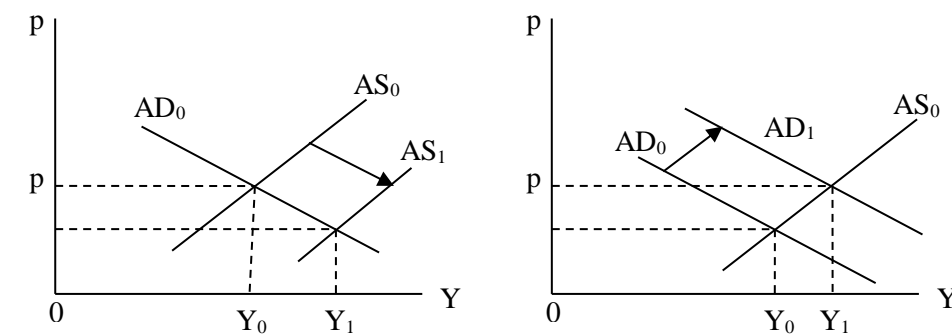
Arsyad (1999: 147-148) mengungkapkan dimana teori kutub pertumbuhan sebagaimana diperkenalkan ekonom Perroux tahun 1970 dimana diberbagai wilayah

dalam kesamaan waktu tidak ada pertumbuhan, hanya sebatas pada sebagian lokasi sebagai kutub atau sentral pertumbuhan dimana mempunyai perbedaan kedalaman.

Sebagaimana pada konsep definisi tersebut pertumbuhan PDRB mempunyai tiga dimensi sosial antara lain bahwa pertumbuhan PDRB adalah suatu mekanisme dan tidak termasuk sebuah deskripsi pada suatu saat berkenaan terhadap derajat atau tingkat pendapatan nasional serta mencakup dimensi perspektif waktu dengan jangka yang panjang.

2.2.2. Teori Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB bisa berasal melalui pertumbuhan di sisi AD atau AS. sebagaimana digambarkan melalui Gambar 2.1, titik potong antara kurva s dengan AD equilibrium yang mewujudkan sebuah banyaknya PDRB atau output agregat beserta tingkat general tertentu. Kemudian output agregat yang diwujudkan pada sebuah ekonomi mewujudkan PN. Jika di periode awal ($t = 0$) output ialah Y_0 , maka makna dari pertumbuhan PDRB yakni jika periode selanjutnya output = Y_1 (dimana $Y_1 > Y_0$). Berdasarkan analisa gambar dapat ditinjau di mana pertumbuhan tersebut dapat diakibatkan melalui kurva penawaran yang bergeser (AS_1) bagian A atau kurva permintaan yang bergeser (AD_1) bagian B.



Gambar 2.1. Permintaan dan Penawaran Agregat di dalam Posisi Ekonomi Makro yang Seimbang

Sumber : Transformasi Ekonomi Indonesia. Tambunan, 2000.

Pada sisi AD kurva bergeser menuju arah kanan yang merefleksikan permintaan pada ekonomi mengalami kenaikan dapat terjadi sebab PN atau pendapatan agregat yang mencakup konsumen atau permintaan masyarakat, pemerintah serta perusahaan meningkat. Penggunaan PDRB atau sisi ad mencakup empat unsur yakni C sebagai konsumsi rumah tangga, perwujudan modal tetap serta perubahan stock atau investasi domestik bruto melalui pihak swasta serta pemerintah (IB), G sebagai pengeluaran/konsumsi pemerintah, serta ekspor neto yakni ekspor jasa dan barang (X) minus impor barang jasa (M).

Terdapat dua aliran pemikiran terkait pertumbuhan PDB ditinjau melalui produksi atau sosis AS baik Neo klasik maupun modern. Pada golongan teori neoklasik berbagai faktor produksi dinilai begitu berdampak kepada pertumbuhan output ialah total modal atau Capital serta tenaga kerja. Kapital dapat berwujud barang modal atau finance. Jumlah tenaga kerja yang bertambah serta kapital bersama berbagai faktor lainnya misalnya derajat daya produksi setiap faktor produksi atau secara universal tidak berubah, meningkatkan manifestasi output. Persentase terkait pertumbuhan output lebih tinggi (*increasing return to scale*), lebih rendah (*decreasing return to scale*), atau sama (*constant return to scale*) daripada persentase terkait pertumbuhan jumlah atas faktor produksi itu (Tambunan, 2001: 14).

Pada golongan teori neoklasik teknologi berkontribusi kepada pertumbuhan output total memperoleh fokus secara ekspresi meskipun di tahun 1950-an serta 1960-an telah muncul kajian terkait pengaruh positif dari pada mekanisme teknologi. Golongan teori neoklasik lebih berfokus terhadap dampak positif melalui akumulasi kapital atau investasi kepada pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh kasusnya yakni eksplorasi

melalui golongan NICs atau *Newly Industrialized Countries* contohnya Korea Selatan, Taiwan, Singapura serta Hongkong umumnya membuktikan pemberian Capital para pekerja 90% sementara the residual yang ada pada kegunaan produksi Cobb Douglas dinilai menjadi dampak akibat aktivitas pertumbuhan melalui berbagai faktor produksi secara keseluruhan atau melalui progres teknologi sebatas berkontribusi antara 10% hingga 50%. (Tambunan, 2001: 19).

Pada golongan teori modern berbagai faktor produksi dinilai sama pentingnya tak terbatas pada modal serta tenaga kerja namun transformasi teknologi mencakup, , kewirausahaan, serta barang modal. Kemudian berbagai faktor lain teori modern pun dinilai cukup berdampak secara signifikan kepada pertumbuhan PDRB yakni pengadaan serta kondisi infrastruktur, regulasi, hukum, kestabilan politik, kebijakan pemerintah, dasar tukar internasional serta birokrasi.

Ditinjau melalui kerangka pemikiran terkait golongan teori modern tersebut terdapat beberapa perbedaan secara mendasar terhadap golongan teori Neo klasik berupa cakupan kapital, dan tenaga kerja. Terkait tenaga kerja pada golongan 3 gambar diagram dimensi mutunya sangat krusial dibandingkan dimensi. Dimensi kualitas tidak sebatas ditinjau melalui jenjang pendidikan tetapi juga keadaan kesehatan menjadi variabel bebas yang begitu krusial pada analisa empiris melalui pendekatan econometrics terkait pertumbuhan ekonomi.

Umumnya tingkatan pendidikan ditaksir melalui persentase kebijakan pendidikan tinggi kepada total dari tenaga kerja atau penduduk yang tercantum di sebuah tingkatan pendidikan tertentu contohnya pendidikan sekolah dasar. Secara umum kesehatan diukur melalui tingkat harapan hidup begitupun juga kapital gimana kualitas atau mutunya sebagaimana yang merefleksikan mekanisme teknologi lebih kecil dibandingkan akumulasi kapital atau kuantitas serta kewirausahaan dimana didalamnya tercakup

kapabilitas individu dalam inovasi yang menjadi sebuah indikator penting untuk pertumbuhan ekonomi.

2.2.3. Model-model Pertumbuhan Ekonomi

Perdebatan sesungguhnya terkait permasalahan pertumbuhan ekonomi sudah berjalan mulai akhir 1940-an dimulai oleh teori Keynes dan Hartold dan Dinar. Di muka perdebatan terkait teori Neo klasik terdapat dua faktor produksi yang krusial untuk pertumbuhan serta perwujudan output (Y), yaitu barang modal (K) serta manusia atau tenaga kerja. Teori pertumbuhan ini berlandaskan kepada fungsi produksi dari Cobb Douglas yakni: (Tambunan, 2001: 9).

$$Y_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta$$

Keterangan :

Y_t = Output atau tingkat produksi dalam periode t

T_t = Tingkat teknologi dalam periode t

K_t = Banyaknya persediaan modal dalam periode t

L_t = Banyaknya tenaga kerja dalam periode t

α, β = Seluruh daya produksi tenaga kerja.

Kemudian fungsi produksi berkembang melalui penambahan dua faktor produksi lainnya yaitu energi (E) serta material produksi atau input (M). Melalui empat kategori faktor itu sederhananya model pertumbuhan atau fungsi produksi PDB bisa dideskripsikan melalui sebuah fungsi sederhana dibawah ini:

$$Y = F(K, L, M, E)$$

Model ini berlandaskan teori pertumbuhan neoklasik mempunyai sebuah titik lemah yang serius. Model itu tak mampu menjelaskan alasan banyaknya negara yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan yang diprediksi menurut model ini.

Pada model ini ilmu pengetahuan serta teknologi di anggap kurang penting atau stabil hingga daya produksi kapital serta tenaga kerja tak mampu dioptimalkan.

Melalui latar belakang model pertumbuhan yang lemah pada teori Neo klasik seperti yang sebelumnya dikaji di mana model pertumbuhan PDB modern menjadi solusi yang ada atau endogenous growth model masuk ke dalam berbagai dimensi endogenitas serta eksternalitas pada mekanisme pembangunan ekonomi. Karakteristik eksistensi teknologi manusia dan merupakan faktor produksi yang dinamis serta tidak eksogen.

Endogenous growth model pun begitu relevan dalam menelaah skema serta laju pertumbuhan PDB negara Indonesia utamanya pengaruh akibat mekanisme teknologi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan optimalisasi mutu SDM kepada pertumbuhan sekaligus pembangunan PDRB di daerah cenderung lebih jelas kini dibandingkan dengan 30 tahun silam.

Model pertumbuhan Harold-Domar yakni sebuah korelasi dengan jangka yang pendek di antara pertumbuhan ekonomi terhadap pembentukan kapital atau optimalisasi penanaman modal. Model ini ialah sebuah pembaharuan yang didasari berbagai model pertumbuhan Harold-Domar. Korset gambar lebih menekankan terhadap laju pertumbuhan penanaman modal (Tambunan, 2001: 39-40).

2.2.4. Metode Penghitungan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan metode dalam menghitung laju pertumbuhan ekonomi, yaitu: (Tambunan, 2001: 11).

$$\Delta \text{PDRB} (t) = [\text{PDRB} (t) - \text{PDRB} (t-1) / \text{PDRB} (t-1)] \times 100\%$$

Keterangan :

$$\Delta \text{PDRB} (t) = \text{Laju pertumbuhan PDRB tahun } (t) \text{ tertentu}$$

$$t-1 = \text{Tahun sebelumnya.}$$

Rumus tersebut dipakai dalam mengkalkulasikan laju pertumbuhan ekonomi sedangkan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan PDRB rata-rata per tahun menerapkan rumus di bawah ini: (Tambunan, 2001: 13).

$$r = \left[n - 1 \sqrt{\frac{tn}{t_0}} \right] \times 100\%$$

atau melalui *compounding factor*

$$tn = t_0 (1 + r)^{n-1}$$

Keterangan :

r = Laju pertumbuhan PDRB rata-rata pertahun

n = Jumlah tahun

m = Tahun terakhir periode

t₀ = Tahun awal periode

(1 + r)ⁿ⁻¹ = Mendeksripsikan *compounding factor*

2.2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tingginya pertumbuhan PDRB serta mekanismenya secara kontinu ialah keadaan pokok untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi sebab seiring bertambahnya penduduk bermakna pula bagi keperluan ekonomi serta jika semakin bertambah diperlukan penambahan akan pendapatan tiap tahunnya. Hal tersebut hanya mampu diperoleh melalui optimalisasi output agregat atau PDRB tiap tahunnya (Tambunan, 2001: 2).

Laju pertumbuhan PDRB suatu negara dapat juga dilihat melalui penghitungan pertambahan pendapatan nasional baik dengan PDRB. Keduanya menunjukkan nilai keseluruhan output atau produk yang dihasilkan di dalam perekonomian suatu negara. Perbedaanya PDRB lebih menekankan pada konsep wilayah yaitu pada suatu negara tertentu, sedangkan PNB lebih menekankan pada konsep kewarganegaraan.

1. Pengertian Produk Domestik Bruto

Merupakan pabrikan barang serta jasa secara keseluruhan yang dimaksud yang dimanifestasikan semua penduduk pada suatu wilayah baik warga daerah dalam provinsi maupun warga negara asing. Data agregat PDRB di suguhkan terkait dasar harga konstan suatu tahun dasar. Selalu agar dinilai terkait harga tetap yang dialami di tahun dasar pada penyajian terkait dasar harga yang konstan hingga agregat pendapatan yang berkembang senantiasa diakibatkan melalui pengembangan secara nyata bukan dari kenaikan harga. Sajian atas harga yang berlaku seluruh agregat ditinjau terkait dasar harga di tahun yang berkenaan baik ketika meninjau produksi serta biaya maupun unsur nilai tambah serta unsur pengeluaran PDRB yang dipakai yakni atas dasar harga konstan 2000.

2. Metode Penghitungan PDRB

a. Metode Produksi

Perhitungan PDRB yakni dengan menambahkan taksiran produksi berbagai barang serta jasa yang diwujudkan melalui sektor produktif pada sebuah negara pada kurun waktu tertentu. Itu ialah satu tahun kalender beserta berbagai sektor produktif yang di plastik yang diklasifikasikan sektor yang menjadi: Sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor mencakup (pertambangan dan galian, listrik, air, gas dan bangunan, transportasi dan komunikasi, perdagangan, bank dan institusi keuangan, sewa rumah, pertanahan, serta jasa lainnya) (Arsyad, 1992 : 23).

Total nilai produksi berbagai barang serta jasa akhir sebagaimana dimanifestasikan pada sektor itu selama tahun fiskal yakni PDB. Penghitungan PDB juga dapat dilakukan melalui penambahan nilai tambah yang dibangun dalam rangka mencegah adanya penghitungan ganda (*multiple counting*). Dengan demikian teknik produksi ini dikenal dengan “nama” model nilai tambah, di mana barang-barang dan jasa-jasa tersebut haruslah dihitung satu kali saja, karena dalam relitanya hampir semua produk mengalami serentetan tahapan produksi. Untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda yang mungkin timbul karena adanya pembelian dan penjualan komponen beberapa kali, maka PDRB hanya memasukkan nilai pasar barang akhir saja dan mengabaikan barang antara berupa komponen-komponen atau barang-barang yang akan diproses lebih lanjut. Barang akhir merupakan berbagai barang maupun jasa dengan langsung dikonsumsi masyarakat dan tidak diproses lebih lanjut atau dijual lagi. Adapun barang antara merupakan barang yang dibeli untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Nilai penjualan barang-barang akhir saja yang dimasukkan dalam PDRB, karena sudah termasuk semua nilai barang antara.

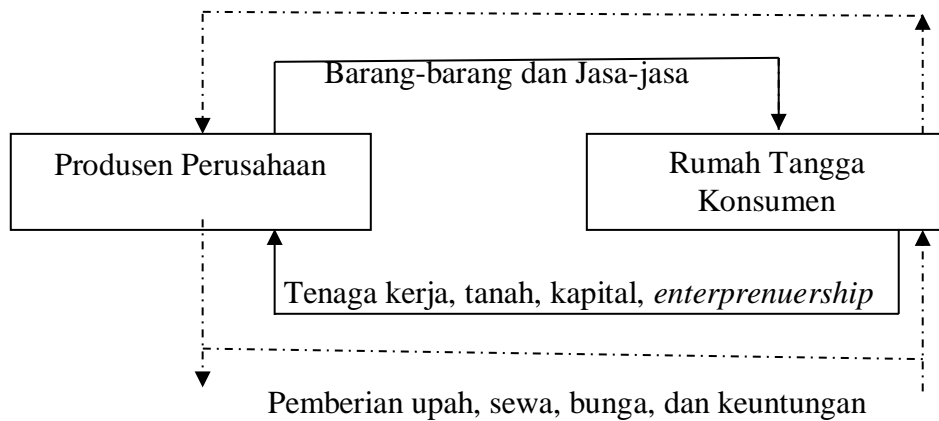
b. Metode Pendapatan

Berdasarkan metode ini perhitungan PDB yakni melalui penjumlahan antara pendapatan berbagai faktor produksi sebagaimana dipakai untuk melakukan produksi berbagai barang serta jasa. Bernilai faktor milik seseorang dalam masyarakat dan mendapatkan balas jasa, maka balas jasa tersebut kembali pada seseorang atau masyarakat sebagai pendapatan.

Melalui model diagram aliran melingkar, kita dapat melihat bahwa penghitungan PDRB dengan metode pendapatan bisa diterapkan melalui:

- 1) Pendekatan aliran pengeluaran atau produk

2) Pendekatan aliran pendapatan atau biaya.



- > Menunjukkan aliran uang berupa pengeluaran dan pendapatan
- > Menunjukkan aliran barang-barang dan jasa-jasa dan faktor-faktor produksi

Gambar 2.2. Diagram Aliran Melingkar

Sumber : Wijaya (1990).

Dua aliran di atas merupakan aliran pengeluaran melalui sektor rumah tangga terhadap perusahaan serta aliran produk berupa barang-barang dan jasa-jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Pada aliran bagian bawah ditemui aliran jasa produktif atau aliran berbagai faktor produksi yang mengalir dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan dan aliran pendapatan berbentuk gaji, bunga, keuntungan dan lain-lain sebagai imbalan atas penggunaan dimanfaatkannya berbagai indikator pabrikan pada perusahaan yang mengalir melalui sektor perusahaan menuju rumah tangga. Masing-masing aliran tersebut haruslah sama dan ini merupakan PDRB, dan penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan mengukur besarnya salah satu dari aliran tersebut.

c. Metode Pengeluaran

Perhitungan pendapatan nasional melalui metode ini yakni mengklasifikasi semua pengeluaran melalui lapisan masyarakat. Penerimaan pendapatan dari seluruh golongan masyarakat selanjutnya dibelanjakan dalam bentuk

jasa atau barangserta ditabung. Pengeluaran konsumsi pada metode ini dibagi ke dalam : (Wijaya, 1990: 25).

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C) dan perumahan yang mencakup pengeluaran untuk barang-barang konsumsi tahan lama, seperti ; rumah, radio, TV dan lain-lain serta untuk mengkonsumsi barang yang habis sekali pakai seperti ; makanan, rokok, dan lain-lain. Jasa-jasa yang habis sekali pakai, seperti ; konsultasi kesehatan ke dokter, tukang gunting rambut, dan lain-lain.
- 2) Pengeluaran konsumsi pemerintah(G) mencakup pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat I serta Kota Madya atau Kabupaten Tingkat II, untuk membeli berbagai barang maupun jasa melalui sektor serta pembelian secara langsung sumber-sumber terutama Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi tidak termasuk pembayaran transfer oleh pemerintah, karena tidak berhubungan dengan kegiatan produksi sedang berjalan, tetapi hanya merupakan transfer pemerintah kepada perumahan atau rumah tangga tertentu.
- 3) Investasi atau pembentukan barang-barang modal (I), investasi di sini merupakan investasi secara riil dan bukan secara finansial. Ada peralatan produksi lainnya, infrastruktur, dan perubahan investasi atau persediaan barang-barang akhir.
- 4) Ekspor adalah penjualan produk domestik ke luar negeri sebagai implikasi dari hubungan perdagangan antar negara jika perekonomian negara tersebut merupakan perekonomian terbuka.

2.2.6. Teori Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi antar Daerah

Dalam menelaah deskripsi terkait tatanan serta pola pertumbuhan ekonomi daerah bisa melalui tipologi Klassen menjadi media analisis. Sjafrizal dalam (Caksa dan Riadi, 2007:5) mengutarakan dimana melalui pemanfaatan alat analisis ini didapat empat kategorisasi pertumbuhan di tiap wilayah yakni wilayah pertumbuhan setia daerah berupa *rapid growth region* atau wilayah pertumbuhan cepat, *retarded region* atau wilayah tertekan, *growing region* atau wilayah sedang tumbuh serta *relatively backward region* atau wilayah relative tertinggal. (2005: 25-43) menerapkan alat analisa dalam mengkategorikan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada empat kategori yakni 1) *low growth, high income*; 2) *high growth, high income*; 3) *high growth, low income*; 4) *low growth, low income*.

2.2.7. Teori Ketimpangan Ekonomi antar Daerah

Berkaitan dengan disparitas regional pada tahun 1965, Williamson menelaah keterkaitan terkait kesenjangan wilayah terhadap tingkatan pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan data ekonomi yang telah maju, dijumpai dimana fase awal pembangunan, kesenjangan wilayah semakin membesar serta pembangunan terfokus pada beberapa daerah. Di fase yang semakin matang melalui pertumbuhan ekonomi terlihat eksistensi keseimbangan tiap daerah serta kesenjangan terminimalisir secara substansial.

Persoalan disparitas ekonomi setiap daerah tidak terbatas pada masalah kesenjangan ekonomi di pulau Jawa dan luar pulauanya anara Kawasan Barat Indonesia atau KABARIN serta Kawasan Timur Indonesia atau KATIMIN. Program-program yang dilakukan pengembangan menjadi perantara atas disparitas setiap daerah selama ini belum sepenuhnya maksimal. Pengalokasian anggaran pembangunan menjadi instrumen dalam mengikis kesenjangan ekonomi my itu nampaknya harus semakin diperhatikan kedepannya. Strategi pengalokasian perlu memotivasi serta menjadikan pertumbuhan

ekonomi nasional dan menjadi sarana cepat untuk meminimalisir kesenjangan wilayah (Majidi dalam Caska dan Riadi, 2007: 3).

Mekanisme pergeseran serta pengumpulan berbagai sumber berbentuk kecakapan tenaga kerja, akumulasi modal, serta sumber daya alam milik sebuah daerah menjadi cuan pada laju pertumbuhan ekonomi daerah terkait. Eksistensi heterogenitas bermacam sifat sebuah daerah mengakibatkan potensi adanya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah maupun sektor ekonominya. Titik tolak atas realitas tersebut Ardani (Kurniasih, 2007: 5) mengutarakan bahwa kesenjangan tiap daerah ialah resiko logis pembanguana serta sebagai sebuah fase perubahan bagi pembangunan.

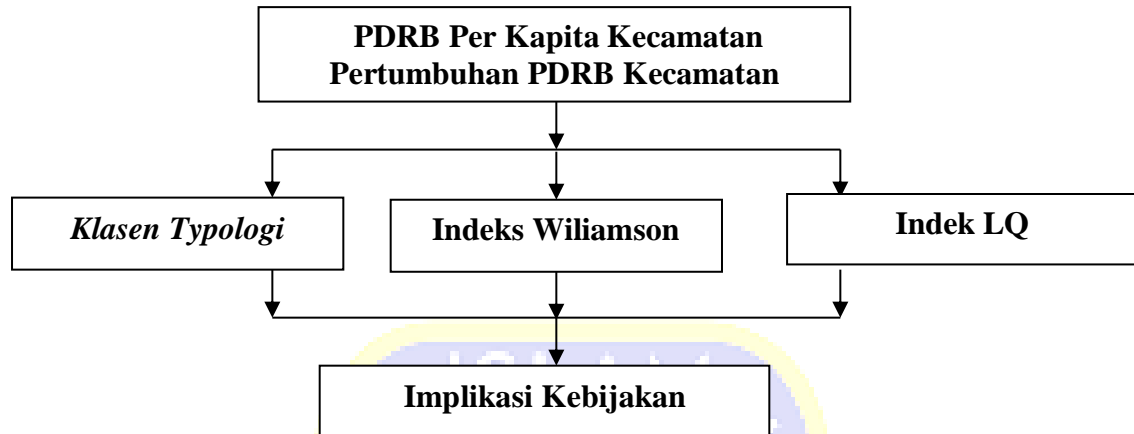
Menurut Myrdal (Kurniasih, 2007: 5) diferensiasi tingkat kemajuan ekonomi tiap daerah yang terlalu berebih mengakibatkan dampak buruk (bacwash effects) berkontribusi dampak dominan yang membuat untung atau spread effects kepada pertumbuhan daerah pada hal ini menyebabkan mekanisme yang tidak seimbang. Berbagai pelaku memiliki resistensi dipasar dengan normal berpotensi meningkat bukan menurun hingga menyebabkan kesenjangan wilayah (Arsyad dalam Kurniasih, 2007: 5).

Kuncoro (2005) mengutarakan dimana konsep Entropi Theil dan penyebaran umumnya berupa Implementasi konsep atas teori informasi bagi pengukuran kesenangan Konsentrasi industri sert ekonomi. Pelaksanaan studi emipiris Theil melalu indikator lakukan Entropi memberikan penawaran terkait perspektif mendetail terkait pendapatan regional perkapita serta disparitas pendapatan internasional, dan peredaran atas Produk Domestik Bruto dunia.

Dalam melaksanakan pengukuran atas kesenjangan pendapatan regional bruto provinsi dengan menerapkan indikator kesenjangan regional di mana dalam konteks ini indeks tail itu diklasifikasikan atas dua sub indikasi yakni ketimpangan regional pada wilayah serta antar wilayah (Ying dalam Sutarno dan Kuncoro, 2005: 100). Melalui

penerapan media analisa indicator entropi theil akan ditelaah eksistensi kesenjangan yang dialami Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

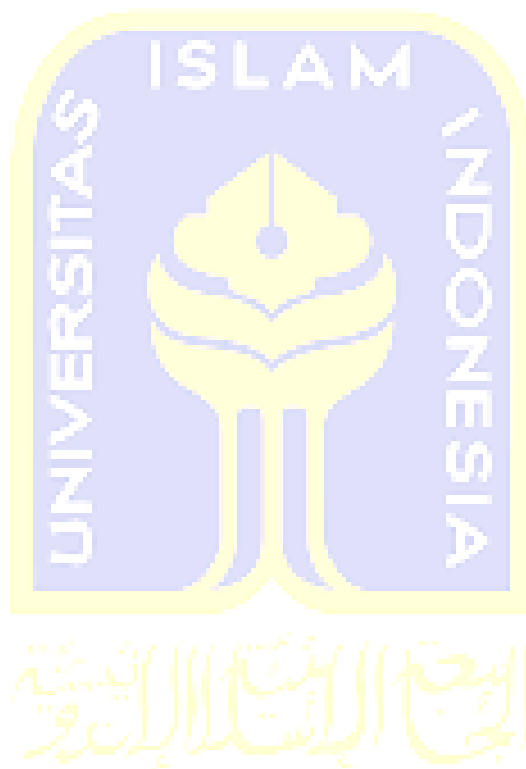
2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran

Dari gambar kerangka penelitian tersebut terlihat di mana PDRB Kabupaten dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten membentuk ketimpangan yang diukur dengan Indeks Wiliamson dari. Bahwa suatu daerah dalam pembangunan ekonominya tidak selalu sistematis dalam artian sebagian daerah memperoleh kecepatan pertumbuhan namun di daerah lainnya tumbuan terjadi secara lambat. Sebuah perekonomian dinyatakan mendapatkan perkembangan atau pertumbuhan dalam ekonominya jika derajat aktivitas ekonomi lebih tinggi dibandingkan perolehan sebelumnya. Seperti halnya terjadi di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur khususnya Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi daerah kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur bisa ditimbang melalui indikator yakni PDRB. Dalam mengalami pertumbuhan ekonominya Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur mengalami kemajuan yang tidak merata antar Kecamatan. Dapat dikatakan bahwa Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur mengalami ketimpangan antar kecamatan dalam proses pertumbuhan ekonominya. Ketimpangan tersebut menjadi permasalahan pokok yang terjadi di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, hal ini akan sangat berpengaruh pada

pengalokasian dana daerah. Dari permasalahan tersebut akan membawa kepada implikasi kebijakan pemerintah khususnya dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini variabel yang digunakan yakni variabel tunggal yaitu ketimpangan pembangunan kecamatan di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dalam periode tahun 2016-2019. Ketimpangan pembangunan adalah ketidakmerataan pembangunan dan ekonomi antar daerah atau kecamatan. Syafrizal (2009) memaparkan bahwa kesenjangan pembangunan wilayah disebabkan berbagai faktor diantaranya potensi daerah berbeda secara signifikan, keadaan demografis dan ketenagakerjaan serta keadaan sosial budaya yang berbeda tiap wilayah.

3.1.2. Jenis dan Sumber Data

Penggunaan jenis data pada penelitian ini yakni data sekunder yang didapat melalui data kedua atau secara tidak langsung berkaitan dengan masalah penelitian. Sudah dipakai pada penelitian ini melalui data sejak tahun 2016 hingga 2019.

3.1.3. Metode Pengumpulan Data

Data diambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dan sumber lain yang berkenaan terhadap data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

3.2. Metode Analisis Data

3.2.1. *Typology Klassen*

Dalam menelaah kategori bisa sih wilayah atas dasar dua index pokok yakni pertumbuhan ekonomi serta PDRB perkapita daerah yang berupa pendapatan menggunakan alat analisis *Typology Klassen*. Untuk menetapkan kata-kata pertumbuhan ekonomi menjadi sumbu vertikal serta rata-rata PDRB perkapita menjadi sumbu horizontal wilayah pada konteks ini kecamatan di telaah melalui 4 klasifikasi yakni:

1. Kecamatan dengan tipe *high growth and high income* atau cepat maju serta cepat tumbuh.

Wilayah yang cepat baik maju maupun tumbuhan yakni wilayah atau daerah yang mempunyai derajat pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita tinggi dibandingkan kata-kata Kabupaten. Kategori ini mencakup Kecamatan sebagai Kecamatan yang cenderung maju namun pada sebagian tahun dapat saja terjadi pertumbuhan dengan relatif kecil. Dengan juga didukung dengan banyaknya pusat-pusat perdagangan dan industri. Selain itu juga yang menjadikan daerah ini lebih maju yaitu dari faktor SDM dan SDA melalui pengolahan potensi sumber daya yang ada akan bisa menambah tingkat pendapatan per kapita yang ada pada wilayah tersebut.

2. Kecamatan dengan tipe *high income but low growth* atau maju namun tertekan.

Wilayah maju namun tertekan ialah wilayah dengan pendapatan perkapita yang cenderung tinggi daripada kata-kata Kabupaten. Kecepatan maju namun tertekan ialah wilayah dengan pendapatan perkapita yang lebih tinggi namun dengan pertumbuhan ekonominya rendah daripada kata-kata Kabupaten. Cakupan kategori ini ialah Kecamatan sebagai Kecamatan terendah kondisinya daripada yang lainnya. Cakupan kategori Kecamatan ini umumnya menjadi sentral pada industri serta perdagangan. Walaupun di wilayah ini merupakan termasuk daerah yang maju. Wilayah yang cenderung maju namun pada sebagian tahun terakhir terjadi penurunan laju pertumbuhan sebab tekannya aktivitas pokok daerah terkait. Dengan demikian meskipun wilayah ini merupakan wilayah maju namun di zaman yang akan datang diprediksi pertumbuhannya tak secepat sebelumnya meskipun kapasitas pembangunan secara mendasar cukup tinggi.

3. Kecamatan dengan tipe *high growth but low income* atau berkembang cepat.

Wilayah dengan emajuan yang cepat ialah daerah dengan derajat pertumbuhan tinggi namun derajat pendapatan perkapita rendah daripada rata-rata Kabupaten. Cakupan Kecamatan berupa wilayah yang cepat dalam pertumbuhan dan kemajuannya serta umumnya ialah Kecamatan yang telah maju pada aspek pertumbuhan dan pembangunan yang cepat. Selain itu kecamatan yang ada Pada kategori ini umumnya ialah sentral industri serta perdagangan.

4. Kecamatan dengan tipe *low growth and low income* atau relatif tertinggal.

Wilayah dengan karakteristik yang relatif tertinggal ialah wilayah dengan derajat pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita rendah dari rata-rata Kabupaten. Masalah dari pada ketinggalan tersebut dikarenakan di daerah yang tertinggal sebagian besar tidak dapat memanfaatkan eksistensi sumber daya di setiap wilayahnya. Tingkat penganggurannya juga masih besar di daerah yang tertinggal dan sebagian besar daerah yang tertinggal. Dikarenakan jauh dari pusat industri akan mengakibatkan nilai tersebut masih banyak pengangguran nya. Sebagian daerah yang tertinggal berada jauh dari pusat pertumbuhan sehingga derajat baik pendapatan perkapita maupun pertumbuhan berposisi di bawah kata-kata yang menunjukkan di mana derajat kesejahteraan ataupun pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut cenderung rendah. Mungkin dengan optimalisasi fasilitas perekonomian daerah tersebut bisa mengejar ketertinggalannya.

Tabel 3.1. Klasifikasi Daerah Menurut *Typology Klassen*

	y	($y_i > y$)	($y_i < y$)
r	($r_i > r$)	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh	Daerah yang Berkembang Cepat
	($r_i < r$)	Daerah maju, tetapi Tertekan	Daerah yang relatif tertinggal

Sumber: Syafrizal (1997).

Keterangan:

- ri = Laju pertumbuhan PDRB daerah i
- yi = PDRB daerah i
- r = Laju pertumbuhan PDRB provinsi
- y = PDRB provinsi

3.2.2. Indeks Ketimpangan Williamson

Dalam menelusuri kesenjangan pembangunan setiap kecamatan yang ada kantor kecamatan Pada Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 2016-2019 bisa dikelola melalui penerapan *regional in equality* atau indeks ketimpangan regional yang diberikan situlah indeks disparitas Williamson (Sjyafrizal, 1997:31) dengan formulasis sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Di mana:

Y_i = PDRB per kapita pada kecamatan i

Y = PPDB per kapita rata-rata di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

f_i = total penduduk kecamatan i

Indeks ketimpangan Williamson memungkinkan untuk memberikan kemungkinan dalam merancang diferensiasi pada periode tertentu bahkan dapat pula memfasilitasi dengan detail pada sub unit geografis yang lebih rendah di mana pertama bermanfaat dalam menelan potensi konsentrasi geografis dalam periode tertentu sedangkan yang kedua pun krusial untuk membahas deskripsi secara merinci terkait kesenjangan misalnya kesenjangan tiap daerah pada sebuah negara serta tiap subunit wilayah untuk sebuah kawasan (Kuncoro, 2001: 87).

3.2.3. Indeks *Location Quotient*

Dalam rangka memutuskan kapasitas spesialisasi sebuah daerah kepada kegiatan ekonomi pokok atau dalam menetapkan sektor unggulan yakni yang mampu mencukupi keperluan daerah itu sendiri serta yang lainnya. Adapun rumus dari LQ yakni:

$$LQ = v_i/v_t / V_i/V_t$$

Dimana V_i yakni pendapatan sektor tertentu di sebuah daerah, V_t ialah jumlah pendapatan daerah itu, V_i yakni pendapatan sektor semacam secara nasional ataupun regional, V_t yakni jumlah pendapatan nasional ataupun regional.

Sebagaimana pada rumusan di atas artinya jika $LQ > 1$ lebih dari satu apa makna bahwa daerah memiliki dasar di sektor itu serta memiliki keunggulan perolehan yang bisa dipasarkan kepada daerah lainnya $LQ = 1$ dengan satu aktungnya sektor tersebut mempunyai sebatas dalam mencukupi keperluan daerah yang terkait; $LQ < 1$ bangun dari satu artinya sektor itu belum cukup dalam melengkapi keperluan daerah terkait hingga harus dibantu daerah lainnya

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1.1. Kondisi Geografi Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo berposisi antara 1110 07' sampai 1110 52' Bujur Timur serta 070 49' sampai 080 20' Lintang Selatan menurut aspek astronomis.

Sebagaimana letak geografisnya, Kabupaten Ponorogo sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten lain seperti Nganjuk, Magetan, serta Madiun dimana Selatan berbatasan Kabupaten Pacitan, barat berbatasan Wonogiri dan Kabupaten Pacitan serta timur bersebrangan terhadap Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung dimana luas wilayah mencapai 1.371,78 km².

Wilayah Kabupaten Ponorogo luasnya hingga 1.371,78 km² yang diklasifikasikan dalam 21 wilayah Kecamatan dan terdiri dari 307 Desa/Kelurahan. 79% wilayahnya merupakan wilayah dengan ketinggian kurang dari 500m dpl, 14,4% ada di antara 500 sampai 700m dpl serta selebihnya mencapai 5,9% ada di ketinggian diatas 700m. Kisaran suhu udara mencapai 18° hingga 31°C.

4.1.1.2. Demografi.

Demografi merupakan tulisan-tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Demografi juga dikenal sebagai ilmu kependudukan yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Demografi tentang penduduk, yang paling utama adalah mempelajari tentang fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian dan mobilitas. Tabel 4.1

merupakan gambaran dari Jumlah Penduduk di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2019.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo 2016 – 2019

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	2016	868.814
2	2017	869.894
3	2018	870.705
4	2019	871.370

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan jumlah penduduk dari hanya 868.814 di tahun 2016 menjadi 871.370 pada tahun 2019 yang berarti dalam kurun waktu 2016-2019 jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo bertambah sebanyak 2.556 jiwa.

Dari total jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo, secara detail dapat dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil, yaitu pembagian jumlah penduduk per kecamatan. Tabel 4.2 adalah gambaran jumlah penduduk per kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 hingga tahun 2019.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo 2016 – 2019 (jiwa)

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019
1	Ponorogo	76.803	77.352	78.977	79.855
2	Siman	44.490	45.454	47.730	49.870
3	Babadan	75.462	76.209	78.980	80.330
4	Jenangan	55.383	56.577	58.303	59.163
5	Kauman	47.678	48.991	49.981	51.304
6	Sukorejo	56.020	58.132	60.151	62.216
7	Sampung	38.281	40.899	42.943	44.952
8	Badegan	33.083	34.214	36.737	38.242
9	Jambon	46.772	47.309	49.003	51.115
10	Balong	45.633	47.155	49.276	52.775

11	Bungkal	37.923	39.598	41.054	43.253
12	Slahung	33.411	34.912	36.584	38.868
13	Ngrayun	62.744	63.545	64.666	65.077
14	Sambit	37.622	40.237	43.199	45.377
15	Mlarak	33.050	34.956	35.132	39.934
16	Jetis	30.281	32.369	33.690	36.177
17	Sawoo	57.872	60.640	62.930	66.582
18	Pulung	50.350	52.695	55.314	57.261
19	Sooko	23.011	25.127	26.263	28.951
20	Pudak	11.953	12.343	12.751	13.206
21	Ngebel	22.146	22.846	23.968	25.680
	Kabupaten Ponorogo	868.814	869.894	870.705	871.370

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2020

Tabel di atas menjelaskan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Kecamatan dengan dengan jumlah penduduk tertinggi sampai tahun 2019 adalah Kecamatan Babadan dengan jumlah penduduk 80.330 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Ponorogo dengan jumlah penduduk 79.855 jiwa, dan Kecamatan Sawoo dengan jumlah penduduk sebanyak 66.582 jiwa. Selain itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah hingga tahun 2019 adalah Kecamatan Pudak dengan jumlah penduduk hanya 13.206 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Ngebel dengan jumlah penduduk 25.680 jiwa dan Kecamatan Sooko dengan jumlah penduduk 28.951 jiwa.

Penduduk di Kabupaten Ponorogo berasal dari berbagai kalangan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Setelah

mengetahui total penduduk miskin dan garis kemiskinan, maka dapat diketahui juga persentase penduduk di Kabupaten Ponorogo yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tabel 4.3 merupakan gambaran mengenai garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 sampai 2019.

Tabel 4.3. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Peduduk Miskin Kabupaten Ponoroo 2016 – 2019.

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Prosentase Penuduk Miskin
2016	266.312	102,06	11,75
2017	279.168	99,03	11,39
2018	297.467	90,22	10,36
2019	313.175	83,97	9,54

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2020

Jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Ponorogo setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 266.312 menjadi Rp. 313.175 di tahun 2019. Hal tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin yang terus menurun setiap tahunnya, dari 102,06 ribu penduduk miskin atau sebesar 11,75% pada tahun 2016 menjadi 83,97 ribu penduduk miskin atau sebesar 9,54% pada tahun 2019 dengan kata lain dalam kurun waktu 2016-2019 terdapat penurunan penduduk miskin sebesar 2,21%

4.1.2. Neraca Regional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau

perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Penelitian ini menggunakan dua jenis PDRB, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, dan PDRB berlaku atas harga konstan (pasar). Tabel 4.6 berisi tentang PDRB atas Dasar harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2015.

Tabel 4.6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo 2015. (miliar rupiah).

No	Sektor	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.720.174,59
2	Pertambangan dan Penggalian	343.297,29
3	Industri Pengolahan	996.946,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.308,91
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.063,07
6	Konstruksi	1.371.299,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.412.583,35
8	Transportasi dan Pergudangan	234.016,54
9	Penyediaan Akomodas dan Makan Minumi	431.033,82
10	Informasi dan Komunikasi	1.018.291,49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	476.378,53
12	Real Estate	364.378,46
13	Jasa Perusahaan	63.698,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	778.047,44
15	Jasa Pendidikan	1.259.677,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.359,08
17	Jasa Lainnya	291.287,42
	PDRB	14.912.841,58

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2016.

Tabel di atas menjelaskan tentang PDRB atas harga berlaku Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo dengan nilai 4.720.174,59, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai 2.412.583,35 dan sektor konstruksi dengan nilai 1.371.299,31. Sektor dengan kontribusi terendah adalah pengadaan listrik dan gas dengan nilai hanya 10.308,91. Sehingga total PDRB Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 adalah 14.912.841,58.

Secara lengkap, PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2019, maka dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo 2016 - 2019 (miliar rupiah).

No	Sektor	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5063,68	5156,10	5399,00	5497,12
2	Pertambangan dan Penggalian	364,07	397,23	435,55	457,58
3	Industri Pengolahan	1104,45	1242,81	1376,31	1502,80
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,33	14,73	15,95	17,45
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,36	15,94	17,14	18,34
6	Konstruksi	1554,68	1740,23	1895,54	2036,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2730,87	3012,14	3376,24	3683,19

8	Transportasi dan Pergudangan	266,42	307,73	343,08	383,9
9	Penyediaan Akomodas dan Makan Minumi	494,33	550,51	609,89	673,68
10	Informasi dan Komunikasi	1126,46	1233,53	1322,20	1445,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	532,69	579,76	627,11	759,63
12	Real Estate	397,3	433,79	487,65	532,4
13	Jasa Perusahaan	71,05	78,82	88,49	97,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	868,53	932,62	1032,59	1134,32
15	Jasa Pendidikan	1379,00	1513,72	1627,86	1778,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123,21	136,8	149,8	165,08
17	Jasa Lainnya	315,75	343,97	377,11	416,18
	PDRB	16.419,19	17.690,42	19.181,49	20.498,89

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2016-2019 PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan dari 16.419,19 pada tahun 2016 menjadi 20.498,89 pada tahun 2020 atau naik sebesar 4.079,7. Sektor dengan kontribusi terbanyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi.

Jenis PDRB selanjutnya adalah PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tabel 4.6 merupakan Tabel yang berisi tentang PDRB atas Dasar

Harga Konstan tahun 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo periode 2016 hingga 2019.

Tabel 4.6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo 2016-2019 (miliar rupiah)

No	Sektor	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3399,08	3381,49	3416,53	3410,71
2	Pertambangan dan Penggalian	283,39	302,04	309,95	317,66
3	Industri Pengolahan	851,98	923,50	993,51	1063,79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,10	11,72	12,19	13,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,74	12,65	13,46	14,38
6	Konstruksi	1114,52	1211,74	1306,12	1402,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2169,20	2340,40	2515,06	2685,83
8	Transportasi dan Pergudangan	209,75	229,52	248,68	271,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minumi	365,11	396,21	428,45	463,20
10	Informasi dan Komunikasi	1064,39	1149,40	1230,84	1328,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	391,51	410,13	430,80	448,55
12	Real Estate	326,68	342,40	367,90	390,95
13	Jasa Perusahaan	54,60	58,19	62,57	66,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	666,70	685,53	715,06	734,75

15	Jasa Pendidikan	1035,12	1107,34	1173,01	1260,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97,26	103,13	111,26	119,81
17	Jasa Lainnya	253,51	268,06	284,19	308,79
	PDRB	12.305,65	12.933,45	13.619,57	14.301,79

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2020

Tabel di atas menjelaskan PDRB atas harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Ponorogo periode 2016-2019. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Ponorogo terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 dengan nilai 12.305,65 menjadi 14.301,79 pada tahun 2019. Sektor dengan kontribusi terbanyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor konstruksi.

Setelah mengetahui jumlah PDRB dari tahun ke tahun, maka dapat juga diketahui laju pertumbuhan PDRB dengan mengurangi jumlah PDRB pada tahun yang akan dihitung dengan PDRB tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan PDRB pada tahun sebelumnya. Tabel 4.7 menggambarkan Persentase laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan di Kabupaten Ponorogo selama periode 2016 hingga 2019.

Tabel 4.7. Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo

No	Tahun	Prosentase
1	2016	5,29 %
2	2017	5,10 %
3	2018	5,31 %

4	2019	5,01 %
----------	-------------	---------------

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Ponorogo terus mengalami penurunan selama periode 2016-2019. Dari 5,29% pada tahun 2016 menjadi 5,01% pada tahun 2019 atau dapat dikatakan turun sebesar 0,28%.

PDRB di Kabupaten Ponorogo berasal dari 17 sektor diantaranya adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan berbagai sektor lainnya. Tabel 4.8 menjelaskan tentang penyebaran persentasi terkait PDRB atas dasar harga berlaku sesuai dengan lapangan usaha di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 sampai tahun 2019.

Tabel 4.8. Penyebaran Persentasi terkait PDRB atas Dasar Harga Berlaku Sesuai Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo (persen) 2016-2019.

No	Sektor	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,84	29,15	28,15	26,82
2	Pertambangan dan Penggalian	2,22	2,25	2,27	2,23
3	Industri Pengolahan	6,73	7,03	7,18	7,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	9,47	9,48	9,84	9,93
7	Perdagangan Besar dan	16,63	17,03	17,60	17,97

	Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				
8	Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,74	1,79	1,87
9	Penyediaan Akomodas dan Makan Minumi	3,01	3,11	3,18	3,29
10	Informasi dan Komunikasi	6,86	6,97	6,89	7,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,24	3,28	3,27	3,22
12	Real Estate	2,42	2,45	2,54	2,60
13	Jasa Perusahaan	0,43	0,45	0,46	0,47
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,29	5,27	5,38	5,53
15	Jasa Pendidikan	8,40	8,56	8,49	8,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,77	0,78	0,81
17	Jasa Lainnya	1,92	1,94	1,97	2,03
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Ponorogo setiap tahunnya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Dari data di atas, sektor ini mengalami penurunan persentase kontribusi setiap tahunnya, hal ini berarti terdapat sektor lain yang mengalami peningkatan persentase kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Ponorogo.

Untuk penyebaran persentasi terkait PDRB atas dasar harga konstan sesuai dengan lapangan usaha di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 sampai tahun 2019 maka dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo (persen) 2016-2019.

No	Sektor	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,80	0,52	1,04	0,17
2	Pertambangan dan Penggalian	2,27	6,58	2,62	2,49
3	Industri Pengolahan	5,17	8,39	7,58	7,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,02	5,59	3,97	7,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,61	7,72	6,41	6,87
6	Konstruksi	5,98	8,72	7,79	7,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,18	7,89	7,46	6,79
8	Transportasi dan Pergudangan	8,16	9,42	8,35	8,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minumi	7,09	8,52	8,14	8,11
10	Informasi dan Komunikasi	7,72	7,99	7,09	7,95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,23	4,76	5,04	4,12
12	Real Estate	6,09	4,81	7,45	6,26
13	Jasa Perusahaan	5,87	6,57	7,53	6,98
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,67	2,82	4,31	2,75
15	Jasa Pendidikan	7,19	6,98	5,93	7,49

16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	6,04	7,88	7,69
17	Jasa Lainnya	4,81	5,74	6,02	8,66
	PDRB	5,29	5,10	5,31	5,01

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2020

Jika dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010, maka persentase PDRB Kabupaten Ponorogo cukup fluktuatif selama periode 2016-2019. Dari 5,29% di tahun 2016, turun menjadi 5,10% pada 2017, kemudian naik menjadi 5,31% pada tahun 2018 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 menjadi 5,01%.

PDRB per kapita dapat direfleksikan melalui Pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Tabel 4.10 merupakan tabel Pendapatan Per Kapita Penduduk di Kabupaten Ponorogo selama periode 2016 hingga 2019.

Tabel 4.10. Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Ponorogo 2016-2019.

No	Tahun	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)
1	2016	18.898.394,82
2	2017	20.336.293,85
3	2018	22.029.837,89
4	2019	23.524.897,58

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari Rp. 18.898.394,82 pada tahun 2016 menjadi Rp. 23.524.897,58 pada 2019 atau dapat dikatakan naik sebesar Rp. 4.626.503 dalam kurun waktu 4 tahun.

Untuk informasi lebih rinci, maka PDRB di Kabupaten Ponorogo dapat di bagi per kecamatan. Tabel 4.11 merupakan gambaran PDRB merupakan PDRB atas dasar Harga berlaku untuk masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo selama periode 2016-2019.

Tabel 4.11. Produks Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasar Harga Berlaku Kecamatan di Kabupaten Ponorogo 2016-2019 (juta rupiah).

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019
1	Ponorogo	2.006.110,9	2.209.221,3	2.209.963,9	2.254.877,9
2	Siman	1.023.956,5	1.084.521,0	1.059.074,5	1.024.944,5
3	Babadan	1.477.727,1	1.415.233,6	1.534.519,2	1.639.911,2
4	Jenangan	820.959,5	952.301,0	991.171,5	1.112.514,5
5	Kauman	985.151,4	1.061.425,2	1.150.889,4	1.429.933,4
6	Sukorejo	776.254,5	807.616,8	767.259,6	819.955,6
7	Sampung	588.795,4	630.712,6	575.444,7	614.966,7
8	Badegan	568.771,6	719.725,8	744.229,6	821.655,6
9	Jambon	578.556,5	717.113,8	778.319,6	810.413,6
10	Balong	810.879,4	1.081.221,0	1.038.114,5	1.120.894,5
11	Bungkal	581.766,3	699.816,8	771.240,6	812.715,6
12	Slahung	573.523,4	607.913,8	685.301,6	818.238,6
13	Ngrayun	599.891,6	711.104,8	660.310,6	817.115,6
14	Sambit	697.334,5	894.321,0	1.061.353,5	1.001.160,5
15	Mlarak	576.778,4	717.218,8	718.245,6	818.988,6
16	Jetis	599.884,5	626.812,5	599.444,7	624.786,7
17	Sawoo	889.554,6	1.094.821,0	1.161.244,5	1.012.134,4

18	Pulung	677.615,5	875.280,6	881.910,8	822.751,6
19	Sooko	543.544,5	611.612,6	543.427,5	618.621,7
20	Pudak	628.383,8	730.712,6	767.602,5	787.977,8
21	Ngebel	413.750,1	441.612,6	482.421,6	514.331,4
	PDRB	16.419.190,0	17.690.420,0	19.181.490,0	20.498.890,0

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2020.

Tabel di atas menunjukkan PDRB atas dasar harga berlaku per kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan dengan PDRB tertinggi adalah Kecamatan Ponorogo, diikuti oleh Kecamatan Babadan dan Kecamatan Kauman. Kemudian untuk kecamatan dengan PDRB terendah adalah Kecamatan Ngebel, diikuti oleh Kecamatan Sampung dan Kecamatan Sooko. Secara keseluruhan, total PDRB per kecamatan dari tahun 2016 hingga 2019 terus mengalami kenaikan.

Dengan mengetahui PDRB per kecamatan, maka dapat pula diketahui Pendapatan Perkapita per kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Tabel 4.12 menjelaskan mengenai Pendapatan Per Kapita untuk masing-masing kecamatan selama periode 2016 hingga 2019.

Tabel 4.12. Pendapatan Per Kapita Kecamatan di Kabupaten Ponorogo 2016-2019 (rupiah).

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019
1	Ponorogo	23.516.150,4	25.137.025,0	26.716.182,0	28.237.153,6
2	Siman	18.820.038,2	19.459.695,5	20.093.746,1	20.552.326,1
3	Babadan	19.582.400,4	18.570.426,1	19.429.212,5	20.414.679,5
4	Jenangan	14.723.312,2	14.980.691,8	16.485.798,3	18.804.227,3

5	Kauman	20.662.599,1	21.665.718,2	23.026.538,1	23.973.440,7
6	Sukorejo	10.286.585,1	12.172.586,5	12.755.558,5	13.179.175,8
7	Sampung	10.156.354,3	12.978.175,5	13.400.198,0	13.680.519,2
8	Badegan	17.192.261,9	18.060.436,0	20.258.311,8	20.707.613,1
9	Jambon	12.369.719,6	15.158.084,1	15.583.101,0	15.854.711,9
10	Balong	17.789.583,4	18.263.619,1	19.037.959,6	21.239.118,9
11	Bungkal	18.224.048,5	18.673.034,0	18.986.003,8	19.189.808,8
12	Slahung	17.174.685,0	17.412.746,3	18.732.276,4	19.051.728,9
13	Ngrayun	9.560.939,7	11.292.152,0	14.757.501,6	16.556.135,0
14	Sambit	15.877.266,0	19.741.059,2	20.939.200,0	22.063.170,8
15	Mlarak	17.451.691,4	18.659.537,7	19.590.276,7	20.508.554,1
16	Jetis	13.205.789,1	15.530.461,2	16.080.578,8	17.270.273,9
17	Sawoo	10.187.216,6	12.756.283,0	13.274.821,2	15.201.321,7
18	Pulung	11.472.006,0	12.838.424,9	13.015.992,3	14.368.446,2
19	Sooko	14.929.577,2	16.381.287,1	19.691.752,7	21.367.887,1
20	Pudak	19.106.818,4	24.895.292,9	28.086.252,1	31.044.813,0
21	Ngebel	13.297.412,6	15.579.121,1	16.034.946,6	17.196.176,0

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kecamatan dengan pendapatan per kapita paling tinggi adalah Kecamatan Pudak kemudian diikuti oleh Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Kauman. Selain itu, Kecamatan dengan pendapatan per kapita terendah adalah Kecamatan Sukorejo, diikuti oleh Kecamatan Sampung dan Kecamatan Pulung.

Selain penjelasan PDRB di Kabupaten Ponorogo, terdapat juga penjelasan PDRB untuk yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal ini berguna dalam

perhitungan indeks Williamson dan Tipologi Klasen. Sama seperti Kabupaten, PDRB di Provinsi juga berasal dari kontribusi 17 sektor. Tabel 4.13 menjelaskan tentang PDRB di Provinsi Jawa Timur atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha pada tahun 2015.

Tabel 4.13. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015 (miliar rupiah)

No	Sektor	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	232.349,34
2	Pertambangan dan Penggalian	64.096,05
3	Industri Pengolahan	494.687,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.787,49
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.573,39
6	Konstruksi	160.496,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	298.172,72
8	Transportasi dan Pergudangan	56.724,43
9	Penyediaan Akomodas dan Makan Minumi	91.476,26
10	Informasi dan Komunikasi	77.087,45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	46.447,11
12	Real Estate	27.560,77
13	Jasa Perusahaan	13.538,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	39.082,07
15	Jasa Pendidikan	46.022,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.640,21
17	Jasa Lainnya	24.140,19
	PDRB	1.689.882,40

Sumber: BPS Jatim 2016

Tabel di atas menunjukkan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 1.689.882,40 miliar. Sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi dengan jumlah

494.687,37 miliar, diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan jumlah 298.172,72 miliar, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan jumlah 232.349,34.

Untuk data yang lebih rinci, maka perlu diketahui juga PDRB tahun-tahun berikutnya. Tabel 4.14 menjelaskan tentang Kontribusi Sektor (Lapangan Usaha) terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur selama periode 2016-2019.

Tabel 4.14. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2019 (miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	249 453,6	258 454,4	259 263,0	266 344,5
2	Pertambangan dan Penggalian	69.900,3	80.846,2	94 200,9	93 848,6
3	Industri Pengolahan	536 436,7	586 235,6	651 126,9	711 303,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6 204,4	6 675,2	6 702,1	6 895,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1 705,1	1 853,1	1 949,0	2 015,9
6	Konstruksi	180 549,5	197 699,0	212 519,5	220 274,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	332 190,9	360 900,2	398 222,4	433 799,9
8	Transportasi dan Pergudangan	62 775,4	69 176,4	75 159,6	80 706,9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	104.938,8	116.058,8	126 843,4	139 142,8
10	Informasi dan Komunikasi	85.149,8	92.928,7	99 216,4	106 717,7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	51.575,9	55.033,1	59 368,8	62 395,4
12	Real Estat	29 907,4	32 080,2	35 576,5	38 887,8
13	Jasa Perusahaan	14 894,1	16 255,9	18 151,0	19 835,4
14	Administrasi Pemerintahan,	43 157,2	45 740,7	50 511,2	55 243,8

	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib				
15	Jasa Pendidikan	49 544,9	52 974,1	56 638,1	61 419,1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11 527,5	12 611,7	13 574,4	14 886,0
17	Sosial/	11 527,5	12 611,7	13 574,4	14 886,0
18	Jasa lainnya	25 827,1	27 395,1	29 743,1	32 073,4
	Produk Domestik Regional Bruto	1 855 738,4	2 012 918,0	2 188 766,3	2 345 790,6

Sumber: BPS Jatim 2020.

Tabel di atas menunjukkan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Provinsi Jawa Timur terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari 1.855.738,4 miliar pada tahun 2016 menjadi 2.345.790,6 miliar pada 2019. Sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Selain penjelasan PDRB atas harga berlaku di Provinsi Jawa Timur, maka terdapat juga penjelasan mengenai PDRB atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 Provinsi Jawa Timur selama periode 2016 hingga 2019.

Tabel 4.15. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2016-2019
(miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	164 762,9	167 360,6	163 799,9	165 738,2
2	Pertambangan dan Penggalian	75.024,9	80.636,4	82 573,6	83 787,6
3	Industri Pengolahan	410 741,3	434 114,2	466 908,0	498 875,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4 483,9	4 599,5	4 499,0	4 561,0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	1 366,7	1 454,6	1 515,4	1 586,7

	Limbah dan Daur Ulang				
6	Konstruksi	127 334,6	136 136,4	145 140,2	153 689,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	257 126,7	273 213,4	290 136,3	307 440,9
8	Transportasi dan Pergudangan	41 115,3	43 835,3	46 712,4	48 471,4
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	73.397,9	79.202,2	85 237,5	91 669,4
10	Informasi dan Komunikasi	79.217,0	84.699,2	90 416,2	97 070,6
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	37.158,6	38.064,5	39 859,9	41 374,5
12	Real Estat	24 298,5	25 247,6	26 823,0	28 441,5
13	Jasa Perusahaan	10 884,7	11 486,9	12 308,5	13 128,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	31 668,1	32 369,7	33 730,2	34 984,3
15	Jasa Pendidikan	37 438,7	38 931,6	41 036,2	44 019,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9 245,4	9 743,8	10 485,7	11 277,8
17	Jasa lainnya	20 298,2	21 203,6	22 259,6	23 652,2
	Produk Domestik Regional Bruto	1 405 563,5	1 482 299,6	1 563 441,8	1 649 768,1

Sumber: BPS Jatim 2020

Tabel di atas menunjukkan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2019. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Provinsi Jawa Timur terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari 1.405.563,5 miliar pada tahun 2016 menjadi 1.649.768,1 miliar pada 2019. Sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

4.2. Indeks Williamson.

Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah.

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Ponorogo adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara kecamatan merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Ponorogo adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

4.2.1. Indeks Williamson 2016

Untuk mengetahui mengenai gambaran Indeks Williamson pada tahun 2016, maka dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini.

Tabel 4.16 Indeks Williamson 2016

No	Kecamatan	Penduduk	PDRB kecamatan	PDRB/Kapita	Proporsi Penduduk		
		F_i	Y_i	Y_i/f_i	f_i/n	$Y_i - (Y_i/f_i)^2$	$(Y_i - (Y_i/f_i)^2) / (f_i/n)$
1	Ponorogo	76803	2006110,9	26,1202 1536	0,0883998 19	52,1546 9181	4,61046 5295
2	Siman	44490	1023956,5	23,0154 3043	0,0512077 38	16,9499 8222	0,86797 0255
3	Babadan	75462	1477727,1	19,5824 0041	0,0868563 35	0,46786 3647	0,04063 6922
4	Jenangan	55383	820959,5	14,8233 1221	0,0637455 2	16,6062 9832	1,05857 7118
5	Kauman	47678	985151,4	20,6625 991	0,0548771 08	3,11241 6738	0,17080 0431

6	Sukorejo	56020	776254,5	13,8567 3866	0,0644787 03	25,4182 9682	1,63893 8815
7	Sampung	38281	588795,4	15,3808 7824	0,0440612 14	12,3729 229	0,54516 601
8	Badegan	33083	568771,6	17,1922 6189	0,0380783 46	2,91088 9597	0,11084 1861
9	Jambon	46772	578556,5	12,3697 1906	0,0538343 07	42,6236 0719	2,29461 2374
10	Balong	45633	810879,4	17,7695 8342	0,0525233 25	1,27421 5194	0,06692 6019
11	Bungkal	37923	581766,3	15,3407 2463	0,0436491 59	12,6570 1723	0,55246 8151
12	Slahung	33411	573523,4	17,1657 0591	0,0384558 72	3,00221 0887	0,11545 2638
13	Ngrayun	62744	599891,6	9,56093 9691	0,0722179 89	87,1880 6834	6,29654 6971
14	Sambit	37622	697334,5	18,5352 8521	0,0433027 09	0,13184 8595	0,00570 9401
15	Mlarak	33050	576778,4	17,4516 9138	0,0380403 63	2,09295 0862	0,07961 6611
16	Jetis	30281	599884,5	19,8105 908	0,0348532 6	0,83210 1499	0,02900 145
17	Sawoo	57872	889554,6	15,3710 7064	0,0666103 45	12,4420 159	0,82876 6968
18	Pulung	50350	677615,5	13,4581 0328	0,0579525 65	29,5967 7211	1,71520 8866
19	Sooko	23011	543544,5	23,6210 7253	0,0264855 31	22,3036 8473	0,59072 493
20	Pudak	11953	628383,8	52,5712 2061	0,0137578 35	1133,85 9197	15,5994 4819
21	Ngebel	22146	413750,1	18,6828 3663	0,0254899 21	0,04646 5335	0,00118 4398
	Kabupaten Ponorogo	868814	16419190	18,8983 9482	19,159160 96	0	37,2190 6367
							6,10074 2879
						Indeks Williams on	0,32281 8045

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 memiliki ketimpangan williamson sebesar 0,322 ($<0,35$), maka berdasarkan ketentuan ketimpangan williamson, pada tahun 2016 di Kabupaten

Ponorogo terjadi ketimpangan distribusi yang cukup rendah yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang hampir merata.

4.2.2. Indeks Williamson 2017

Untuk mengetahui mengenai gambaran Indeks Williamson pada tahun 2017, maka dapat dilihat pada tabel 4.17 di bawah ini.

Tabel 4.17 Indeks Williamson 2017

No	Kecamatan	Penduduk	PDRB kecamatan	PDRB/ Kapita	Proporsi Penduduk		
		F_i	Y_i	Y_i/f_i	f_i/n	$Y_i - (Y_i/f_i)^2$	$(Y_i - (Y_i/f_i)^2) / (f_i/n)$
1	Ponorogo	77352	2209221,3	28,5606 2287	0,0889211 79	50,0539 206	4,45085 3628
2	Siman	45454	1084521	23,8597 4832	0,0522523 43	5,63589 9724	0,29448 8968
3	Babadan	76209	1415233,6	18,5704 2607	0,0876072 26	8,49907 4699	0,74458 0355
4	Jenangan	56577	952301	16,8319 4584	0,0650389 59	21,6578 3095	1,40860 2774
5	Kauman	48991	1061425,2	21,6657 1819	0,0563183 56	0,03239 0955	0,00182 4205
6	Sukorejo	58132	807616,8	13,8928 0947	0,0668265 33	57,6526 4449	3,85272 6343
7	Sampung	40899	630712,6	15,4212 2301	0,0470160 73	36,7784 0656	1,72917 6256
8	Badegan	34214	719725,8	21,0360 0281	0,0393312 29	0,20226 653	0,00795 5391
9	Jambon	47309	717113,8	15,1580 8409	0,0543847 87	40,0392 7139	2,17752 7251
10	Balong	47155	1081221	22,9290 8493	0,0542077 54	2,08323 501	0,11292 7491
11	Bungkal	39598	699816,8	17,6730 3399	0,0455204 89	14,5367 5243	0,66172 0075
12	Slahung	34912	607913,8	17,4127 4633	0,0401336 25	16,5893 0445	0,66578 8932
13	Ngrayun	63545	711104,8	11,1905 7046	0,0730491 3	105,990 5842	7,74251 9976
14	Sambit	40237	894321	22,2263 3397	0,0462550 61	0,54847 4512	0,02536 9722
15	Mlarak	34956	717218,8	20,5177 5947	0,0401842 06	0,93699 2737	0,03765 2309
16	Jetis	32369	626812,5	19,3645	0,0372102	4,49928	0,16741

				9267	81	01	9476
17	Sawoo	60640	1094821	18,0544 3602	0,0697096 43	11,7738 6982	0,82075 2259
18	Pulung	52695	875280,6	16,6103 1597	0,0605763 46	23,7697 9186	1,43988 7138
19	Sooko	25127	611612,6	24,3408 5247	0,0288851 29	8,15164 8253	0,23546 1408
20	Pudak	12343	730712,6	59,2005 6712	0,0141890 85	1422,40 7934	20,1826 6724
21	Ngebel	22846	441612,6	19,3299 7461	0,0262629 7	4,64733 8722	0,12205 2917
	Kabupaten Ponorogo	869894	18690319, 2	21,4857 4332	21,135564 22	0	46,8819 5411
							6,84703 9807
						Indeks Williamson	0,31867 8284

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 memiliki ketimpangan williamson sebesar 0,318 ($<0,35$) atau terjadi penurunan dibandingkan tahun 2016, maka berdasarkan ketentuan ketimpangan williamson, pada tahun 2017 di Kabupaten Ponorogo terjadi ketimpangan distribusi yang cukup rendah yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang hampir merata.

4.2.3. Indeks Williamson 2018

Untuk mengetahui mengenai gambaran Indeks Williamson pada tahun 2018, maka dapat dilihat pada tabel 4.18 di bawah ini.

Tabel 4.18 Indeks Williamson 2018

No	Kecamatan	Penduduk	PDRB kecamatan	PDRB/ Kapita	Proporsi Penduduk		
		Fi	Yi	Yi/fi	fi/n	Yi- (Yi/fi) ²	(Yi- (Yi/fi) ²) (fi/n)
1	Ponorogo	78977	2209963,9	27,9823 7335	0,0907046 59	35,4326 7839	3,21390 9006
2	Siman	47730	1059074,5	22,1888	0,0548176	0,02528	0,00138

				6445	48	9445	6308
3	Babadan	78980	1534519,2	19,4292 1246	0,0907081 04	6,76325 2633	0,61348 1826
4	Jenang	58303	991171,5	17,0003 5161	0,0669606 81	25,2957 3223	1,69381 9464
5	Kauman	49981	1150889,4	23,0265 3808	0,0574029 09	0,99341 1278	0,05702 4697
6	Sukorejo	60151	767259,6	12,7555 5851	0,0690830 99	86,0122 58	5,94199 3363
7	Sampung	42943	575444,7	13,4001 9794	0,0493198 04	74,4706 8572	3,67287 9629
8	Badegan	36737	744229,6	20,2583 1178	0,0421922 47	3,13830 4745	0,13241 2127
9	Jambon	49003	778319,6	15,8831 0103	0,0562796 81	37,7823 7397	2,12637 997
10	Balong	49276	1038114,5	21,0673 4516	0,0565932 2	0,92639 2259	0,05242 7521
11	Bungkal	41054	771240,6	18,7860 038	0,0471502 98	10,5224 596	0,49613 7103
12	Slahung	36584	685301,6	18,7322 764	0,0420165 27	10,8739 1175	0,45688 4005
13	Ngrayun	64666	660310,6	10,2110 9393	0,0742685 52	139,682 7088	10,3740 3259
14	Sambit	43199	1061353,5	24,5689 3678	0,0496138 19	6,44702 3178	0,31986 1439
15	Mlarak	35132	718245,6	20,4441 9902	0,0403489 13	2,51425 0623	0,10144 7279
16	Jetis	33690	599444,7	17,7929 5637	0,0386927 83	17,9511 6504	0,69458 0541
17	Sawoo	62930	1161244,5	18,4529 5567	0,0722747 66	12,7940 8645	0,92468 9603
18	Pulung	55314	881910,8	15,9437 1768	0,0635278 31	37,0408 5916	2,35312 5437
19	Sooko	26263	543427,5	20,6917 5266	0,0301629 14	1,79047 2094	0,05400 5856
20	Pudak	12751	767602,5	60,1993 9613	0,0146444 55	1456,91 5176	21,3357 2841
21	Ngebel	23968	482421,6	20,1277 3698	0,0275271 19	3,61798 7862	0,09959 2782
	Kabupaten Ponorogo	870705	19181490	22,0298 3789	20,902041 89	0	54,7157 9896
							7,39701 284
						Indeks Williams on	0,33577 2459

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 memiliki ketimpangan williamson sebesar 0,335 ($<0,35$) atau terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2017, maka berdasarkan ketentuan ketimpangan williamson, pada tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo terjadi ketimpangan distribusi yang cukup rendah yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang hampir merata.

4.2.4. Indeks Williamson 2019

Untuk mengetahui mengenai gambaran Indeks Williamson pada tahun 2019, maka dapat dilihat pada tabel 4.19 di bawah ini.

Tabel 4.19 Indeks Williamson 2019

No	Kecamatan	Penduduk	PDRB kecamatan	PDRB/ Kapita	Proporsi Penduduk		
		Fi	Yi	Yi/fi	fi/n	Yi- (Yi/fi) ^2	(Yi- (Yi/fi)^2) (fi/n)
1	Ponorogo	79855	2254877,9	28,2371 5359	0,0916430 45	24,421 18601	2,238031 845
2	Siman	49870	1024944,5	20,5523 2605	0,0572317 16	7,5243 11802	0,430629 273
3	Babadan	80330	1639911,2	20,4146 7945	0,0921881 63	8,2984 00826	0,765014 332
4	Jenangan	59163	1112514,5	18,8042 273	0,0678965 31	20,170 39821	1,369500 062
5	Kauman	51304	1429933,4	27,8717 7218	0,0588774	20,943 42076	1,233094 161
6	Sukorejo	62216	819955,6	13,1791 7577	0,0714002 09	102,33 74655	7,306916 415
7	Sampung	44952	614966,7	13,6805 1922	0,0515877 3	92,445 4315	4,769049 929
8	Badegan	38242	821655,6	21,4856 859	0,0438872 12	3,2749 70861	0,143729 341
9	Jambon	51115	810413,6	15,8547 1192	0,0586605	55,363 4514	3,247647 748
10	Balong	52775	1120894,5	21,2391 189	0,0605655 46	4,2281 84832	0,256082 324
11	Bungkal	43253	812715,6	18,7898 088	0,0496379 26	20,300 11734	1,007655 732
12	Slahung	38868	818238,6	21,0517 2893	0,0446056 21	5,0339 42988	0,224542 153

13	Ngrayun	65077	817115,6	12,5561 3504	0,0746835 44	115,33 12524	8,613346 698
14	Sambit	45377	1001160,5	22,0631 7077	0,0520754 67	1,5183 24682	0,079067 467
15	Mlarak	39934	818988,6	20,5085 5411	0,0458289 82	7,7663 64804	0,355924 592
16	Jetis	36177	624786,7	17,2702 7393	0,0415173 81	36,301 83026	1,507156 906
17	Sawoo	66582	1012134,4	15,2013 2168	0,0764107 1	65,513 6822	5,005946 943
18	Pulung	57261	822751,6	14,3684 4624	0,0657137 61	79,690 03841	5,236732 145
19	Sooko	28951	618621,7	21,3678 8712	0,0332246 92	3,7152 05487	0,123436 559
20	Pudak	13206	787977,8	59,6681 6599	0,0151554 45	1322,9 8	20,05035 046
21	Ngebel	25680	514331,4	20,0284 8131	0,0294708 33	10,672 58754	0,314530 048
	Kabupaten Ponorogo	871370	20298890	23,2953 7395	1	0	64,27838 514
							8,017380 192
						Indeks Wilia mson	0,344161 901

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 memiliki ketimpangan williamson sebesar 0,334 ($<0,35$) atau terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2018, maka berdasarkan ketentuan ketimpangan williamson, pada tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo terjadi ketimpangan distribusi yang cukup rendah yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang hampir merata.

4.3.TIPOLOGI KLASSEN

Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi setiap wilayah tentunya masing-masing berbeda. Ada wilayah yang mampu memacu kegiatan ekonominya sehingga dapat tumbuh pesat. Namun di sisi lain ada pula wilayah yang tidak mudah memacu kegiatan ekonomi wilayah tersebut sehingga siklus ekonominya

stagnan di satu titik atau bahkan tumbuh negatif. Untuk dapat membandingkan tingkat kemajuan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, maka digunakan tipologi klasen. Tipologi Klasen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha atau komoditi unggulan di suatu daerah.

4.3.1. Tipologi Klasen 2017

Untuk mengetahui mengenai Tipologi Klasen masing-masing kecamatan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Kecamatan	Perkapita Yi	Perkapita Y	Laju Ri	Pertumbuhan R	Tipologi Klasen
1	Ponorogo	28,56062	21,48574	10,12458	5,1	Maju dan tumbuh pesat
2	Siman	23,85975	21,48574	5,914753	5,1	Maju dan tumbuh pesat
3	Babadan	18,57043	21,48574	-4,22903	5,1	Relatif tertinggal
4	Jenangan	16,83195	21,48574	15,99854	5,1	Wilayah sedang tumbuh
5	Kauman	21,66572	21,48574	7,742343	5,1	Maju dan tumbuh pesat
6	Sukorejo	13,89281	21,48574	4,040208	5,1	Relatif tertinggal
7	Sampung	15,42122	21,48574	7,119145	5,1	Wilayah sedang tumbuh
8	Badegan	21,036	21,48574	26,54039	5,1	Wilayah sedang tumbuh
9	Jambon	15,15808	21,48574	23,94879	5,1	Wilayah sedang tumbuh
10	Balong	22,92908	21,48574	33,33931	5,1	Maju dan tumbuh pesat
11	Bungkal	17,67303	21,48574	20,29174	5,1	Wilayah sedang tumbuh
12	Slahung	17,41275	21,48574	5,996338	5,1	Wilayah sedang tumbuh
13	Ngrayun	11,19057	21,48574	18,53888	5,1	Wilayah sedang tumbuh
14	Sambit	22,22633	21,48574	28,24849	5,1	Maju dan tumbuh pesat
15	Mlarak	20,51776	21,48574	24,34911	5,1	Wilayah sedang tumbuh
16	Jetis	19,36459	21,48574	4,488864	5,1	Relatif tertinggal

17	Sawoo	18,05444	21,48574	23,07519	5,1	Wilayah sedang tumbuh
18	Pulung	16,61032	21,48574	29,17069	5,1	Wilayah sedang tumbuh
19	Sooko	24,34085	21,48574	12,523	5,1	Maju dan tumbuh pesat
20	Pudak	59,20057	21,48574	16,28444	5,1	Maju dan tumbuh pesat
21	Ngebel	19,32997	21,48574	6,734137	5,1	Wilayah sedang tumbuh
	PDRB/kapita Ponorogo	21485,74				

4.3.2. Tabel Tipologi Klasen 2017

Untuk mengetahui mengenai Tipologi Klasen masing-masing kecamatan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.21 Tipologi Klasen 2017

Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita	Laju Pertumbuhan diatas rata-rata ($y_i > Y$)	Laju Pertumbuhan dibawah rata-rata ($y_i < Y$)
Pendapatan Perkapita diatas rata-rata ($r_i > r$)	Daerah Maju dan Tumbuh pesat: Ponorogo, Siman, Kauman, Balong, Sambit, Sooko, Pudak	Daerah Sedang Tumbuh: Jenangan, Sampung, Badegan, Bungkal, Slahung, Ngrayun, Mlarak, Sawoo, Pulung, Ngebel.
Pendapatan dibawah rata-rata ($r_i < r$)	Daerah Berkembang:	Daerah Tertinggal: Babadan, Sukorejo, Jetis.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil analisis tipologi klasen untuk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 7 kecamatan yang masuk kategori maju dan tumbuh pesat (Ponorogo, Siman, Kauman, Balong, Sambit, Jetis, Sooko dan Pudak); 10 kecamatan yang masuk kategori sedang tumbuh (Jenangan, Sampung, Badegan, Bungkal,

Slahung, Ngrayun, Mlarak, Sawoo, Pulung dan Ngabel); dan 3 kecamatan dengan kategori tertinggal (Babadan, Sukorejo, Jetis).

4.3.3. Tipologi Klasen 2018

Untuk mengetahui mengenai Tipologi Klasen masing-masing kecamatan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Kecamatan	Perkapita Yi	Perkapita Y	Laju Ri	Pertumbuhan R	Tipologi Klasen
1	Ponorogo	27,98237	22,02984	2,032341	5,31	Berkembang
2	Siman	22,18886	22,02984	-3,22263	5,31	Berkembang
3	Babadan	19,42921	22,02984	6,86808	5,31	Wilayah sedang tumbuh
4	Jenangan	17,00035	22,02984	12,24238	5,31	Maju dan tumbuh pesat
5	Kauman	23,02654	22,02984	24,24594	5,31	Maju dan tumbuh pesat
6	Sukorejo	12,75556	22,02984	6,86808	5,31	Wilayah sedang tumbuh
7	Sampung	13,4002	22,02984	6,86808	5,31	Wilayah sedang tumbuh
8	Badegan	20,25831	22,02984	10,40351	5,31	Maju dan tumbuh pesat
9	Jambon	15,8831	22,02984	4,123499	5,31	Relatif tertinggal
10	Balong	21,06735	22,02984	7,974072	5,31	Wilayah sedang tumbuh
11	Bungkal	18,786	22,02984	5,377699	5,31	Wilayah sedang tumbuh
12	Slahung	18,73228	22,02984	19,39832	5,31	Wilayah sedang tumbuh
13	Ngrayun	10,21109	22,02984	23,74716	5,31	Wilayah sedang tumbuh
14	Sambit	24,56894	22,02984	-5,67134	5,31	Berkembang
15	Mlarak	20,4442	22,02984	14,02626	5,31	Wilayah sedang tumbuh
16	Jetis	17,79296	22,02984	4,227579	5,31	Relatif tertinggal
17	Sawoo	18,45296	22,02984	-12,8405	5,31	Relatif tertinggal
18	Pulung	15,94372	22,02984	-6,70807	5,31	Relatif tertinggal
19	Sooko	20,69175	22,02984	13,83703	5,31	Wilayah sedang tumbuh
20	Pudak	60,1994	22,02984	2,654408	5,31	Berkembang
21	Ngebel	20,12774	22,02984	6,614505	5,31	Wilayah sedang tumbuh

	PDRB/kapita Ponorogo	22029,84				
--	----------------------	----------	--	--	--	--

4.3.4. Tabel Tipologi Klasen 2018

Tabel 4.22 menggambarkan rangkuman Tipologi Klasen untuk masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018.

Tabel 4.22 Tipologi Klasen 2018

Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita	Laju Pertumbuhan di atas rata-rata ($y_i > Y$)	Laju Pertumbuhan di bawah rata-rata ($y_i < Y$)
Pendapatan Perkapita di atas rata-rata ($r_i > r$)	Daerah Maju dan Tumbuh Pesat: Jenangan, Kauman, Badegan.	Daerah Sedang Tumbuh: Babadan, Sukorejo, Sampung, Balong, Bungkal, Slahung, Ngrayun, Mlarak, Sooko, Ngebel.
Pendapatan di bawah rata-rata ($r_i < r$)	Daerah Berkembang: Ponorogo, Siman, Sambit, Pudak.	Daerah Tertinggal: Babadan, Sukorejo, Jetis.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil analisis tipologi klasen untuk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 3 kecamatan yang masuk kategori maju dan tumbuh pesat (Jenangan, Kauman, Badegan); 10 kecamatan yang masuk kategori sedang tumbuh (Babadan, Sukorejo, Sampung, Balong, Bungkal, Slahung, Ngrayun, Mlarak, Sooko dan Ngebel); 4 Kecamatan dalam kategori berkembang (Ponorogo, Siman, Sambit dan Pudak) dan 3 kecamatan dengan kategori tertinggal (Babadan, Sukorejo, Jetis).

4.3.5. Tipologi Klasen 2019

Untuk mengetahui mengenai Tipologi Klasen masing-masing kecamatan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Kecamatan	Perkapita Yi	Perkapita Y	Laju Ri	Pertumbuhan R	Tipologi Klasen
1	Ponorogo	28,23715	23,29537	0,033614	5,01	Berkembang
2	Siman	20,55233	23,29537	-2,34634	5,01	Relatif tertinggal
3	Babadan	20,41468	23,29537	8,428686	5,01	Wilayah sedang tumbuh
4	Jenangan	18,80423	23,29537	4,081745	5,01	Relatif tertinggal
5	Kauman	27,87177	23,29537	8,428686	5,01	Maju dan tumbuh pesat
6	Sukorejo	13,17918	23,29537	-4,99707	5,01	Relatif tertinggal
7	Sampung	13,68052	23,29537	-8,76277	5,01	Relatif tertinggal
8	Badegan	21,48569	23,29537	3,404602	5,01	Relatif tertinggal
9	Jambon	15,85471	23,29537	8,535019	5,01	Wilayah sedang tumbuh
10	Balong	21,23912	23,29537	-3,98684	5,01	Relatif tertinggal
11	Bungkal	18,78981	23,29537	10,20607	5,01	Wilayah sedang tumbuh
12	Slahung	21,05173	23,29537	12,73006	5,01	Wilayah sedang tumbuh
13	Ngrayun	12,55614	23,29537	-7,143	5,01	Relatif tertinggal
14	Sambit	22,06317	23,29537	18,67702	5,01	Wilayah sedang tumbuh
15	Mlarak	20,50855	23,29537	0,143164	5,01	Relatif tertinggal
16	Jetis	17,27027	23,29537	-4,36619	5,01	Relatif tertinggal
17	Sawoo	15,20132	23,29537	6,067065	5,01	Wilayah sedang tumbuh
18	Pulung	14,36845	23,29537	0,757494	5,01	Relatif tertinggal
19	Sooko	21,36789	23,29537	-11,1484	5,01	Relatif tertinggal
20	Pudak	59,66817	23,29537	5,048483	5,01	Maju dan tumbuh pesat
21	Ngebel	20,02848	23,29537	9,240905	5,01	Wilayah sedang tumbuh
	PDRB/kapita Ponorogo	23295,37				

4.3.6. Tabel Tipologi Klasen 2019

Tabel 4.23 menggambarkan rangkuman Tipologi Klasen untuk masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019.

Tabel 4.23 Tipologi Klasen 2019

Laju Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan diatas rata-rata ($y_i > Y$)	Laju Pertumbuhan dibawah rata-rata ($y_i < Y$)
Pendapatan Perkapita		
Pendapatan Perkapita diatas rata-rata ($r_i > r$)	Daerah Maju dan Tumbuh Pesat: Kauman, Pudak	Daerah Sedang Tumbuh: Babadan, Jambon, Bungkal, Slahung, Sambit, Sawoo, Ngebel.
Pendapatan dibawah rata-rata ($r_i < r$)	Daerah Berkembang: Ponorogo	Daerah Tertinggal: Siman, Sukorejo, Sampung, Badegan, Balong, Ngayun, Mlarak, Jetis, Pulung, Sooko.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil analisis tipologi klasen untuk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 2 kecamatan yang masuk kategori maju dan tumbuh pesat (Kauman, Pudak); 7 kecamatan yang masuk kategori sedang tumbuh (Babadan, Jambon, Bungkal, Slahung, Sambit, Sawoo dan Ngebel); 1 Kecamatan dalam kategori berkembang (Ponorogo) dan 10 kecamatan dengan kategori tertinggal (Siman, Sukorejo, Sampung, Badegan, Balong, Ngrayun, Mlarak, Jetis, Pulung dan Sooko).

Faktor penyebab daerah tertinggal beberapa Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, antara lain:

1. Sumber daya Alam. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.

2. Sumberdaya Manusia. Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.
3. Prasarana dan Sarana. Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
4. Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan Rawan Bencana. Daerah tertinggal secara fisik lokasinya amat terisolasi, disamping itu seringkali suatu daerah mengalami konflik sosial bencana alam seperti gempa bumi, kekeringan dan banjir, dan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.
5. Geografis. Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/ pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.

Dari faktor penyebab daerah tertinggal beberapa Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa kecamatan tersebut memiliki wilayah yang tandus, transportasi yang sulit, sering terjadi bencana alam seperti tanah longsor.

4.4. INDEKS LQ

Salah satu contoh pendekatan kuantitatif yang dapat digunakan untuk menemukan potensi suatu daerah adalah dengan menggunakan analisis *location quotient* (lq) dan analisis *shift share*. LQ merupakan suatu perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar. Tabel 4.24 merupakan Indeks LQ Kabupaten Ponorogo selama periode 2016-2019.

Tabel 4.24 Indeks LQ

Lapangan Usaha	Nilai LQ				Rerata LQ
	2016	2017	2018	2019	
Pertanian, Kehutanan, serta Perikanan.	2,3563955 45	2,3156688 68	2,3943605 85	2,3738574 12	2,360070602
Pertambangan dan Penggalian	0,4314448 91	0,4292940 85	0,4308919 39	0,4373360 05	0,43224173
Industri Pengolahan	0,2369230 21	0,2438116 66	0,2442636 69	0,2459780 99	0,242744114
Pengadaan Listrik dan gas	0,2827569 54	0,2920374 6	0,3110324 21	0,3315698 8	0,304349179
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,9811629 42	0,9967093 12	1,0196138 48	1,0454337 51	1,010729963
Konstruksi	0,9997413 89	1,0201329 05	1,0330308 97	1,0528992 71	1,026451115
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,9636041 33	0,9817697 97	0,9950942 81	1,0077419 32	0,987052536
Transportasi dan Pergudangan	0,5826996 27	0,6000923 99	0,6111201 81	0,6450305 4	0,609735687
Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	0,5681805 04	0,5733367 25	0,5770153 84	0,5828765 92	0,575352301
Informasi dan Komunikasi	1,5347181 47	1,5552974 43	1,5626916 78	1,5789144 48	1,557905429
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,2034547 09	1,2348749 54	1,2406733 06	1,2505773 39	1,232395077
Real Estate	1,5356396 49	1,5543013 66	1,5744917 4	1,5856275 12	1,562515067
Jasa Perusahaan	0,5729575	0,5805867	0,5835512	0,5881926	0,581322019

	06	1	09	49	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,4046655	2,4272212	2,4335569	2,4226956	2,422034851
Jasa Pendidikan	3,1580294	3,2598702	3,2813497	3,3040143	3,25081594
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,2015858	1,2130486	1,2180344	1,2254656	1,214533646
Jasa Lainnya	1,4265395	1,4489185	1,4655795	1,5059971	1,461758676

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai LQ terbesar berasal dari sektor Jasa pendidikan, diikuti oleh sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dan Pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian rata-rata LQ terkecil berasal dari sektor Industri pengolahan, diikuti oleh pengadaan listrik dan gas, dan penyediaan akomodasi makan dan minum.

4.5. Penentuan LQ dan IW

4.5.1. Penentuan LQ :

Melalui kalkulasi LQ atau Location Quotient sebuah sektor, ciri secara general yang diwujudkan yakni:

- b. Apabila $LQ > 1$ dinyatakan sebagai sektor basis yakni sektor dengan derajat pembedangannya tinggi dibandingkan derajat daerah acuan
- c. Apabila $LQ < 1$ dinyatakan sebagai sektor non basis yakni sektor dengan derajat pembedangannya rendah dibandingkan derajat daerah acuan
- d. Apabila $LQ = 1$ dinyatakan sebagai sektor non basis yakni sektor dengan derajat pembedangannya sama terhadap derajat daerah acuan

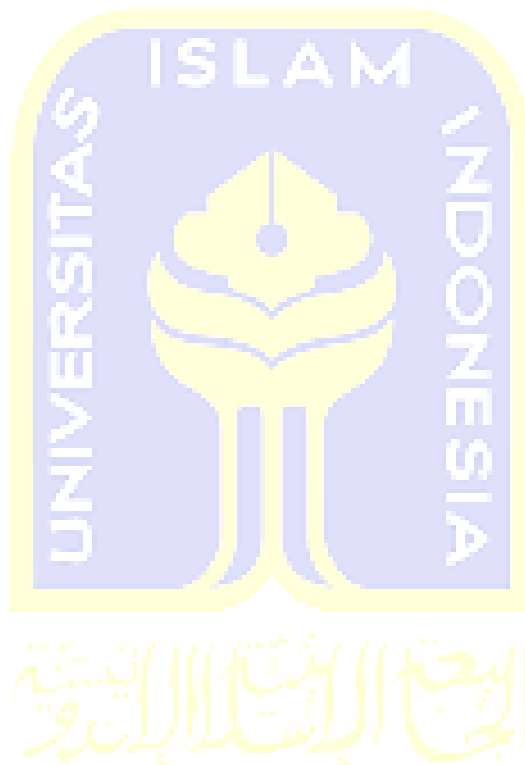
4.5.2. Kriteria Williamson.

Besarnya nilai IW:

Kemudian terdapat Kriteria Indeks Williamson yang men detail yakni besar IW ialah

$$0 < IW < 1.$$

- a. Apabila $IW=0$ artinya pemerataan yang besar dalam pembangunan wilayah,
- b. Apabila $IW=1$ artinya pembangunan wilayah tidak begitu merata atau disparitas sempurna.
- c. Apabila $IW \sim 0$ artinya pembangunan wilayah hampir merata,
- d. Apabila $IW \sim 1$ artinya pembangunan wilayah menuju kepada ketidakmerata



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

Kriteria klasen tahun 2017 daerah maju dan tumbuh pesat: Ponorogo, Siman, Kauman, Balong, Sambit, Sooko, Pudak. Daerah sedang tumbuh: Jenangan, Sampung, Badegan, Bungkal, Slahung, Ngrayun, Mlarak, Sawoo, Pulung, dan Ngebel. Daerah berkembang tidak ada, daerah tertinggal: Babadan, Sukorejo, Jetis. Kriteria klasen tahun 2018 daerah maju dan tumbuh pesat: Jenangan, Kauman, Badegan. Daerah berkembang: Babadan, Sukorejo, Sampung, Balong, Bungkal, Slahung, Ngrayun, Mlarak, Sooko, Ngebel. Daerah berkembang Ponorogo, Siman, Sambit, Pudak. Daerah tertinggal: Babadan, Sukorejo, Jetis. Kriteria klasen tahun 2019 daerah maju dan tumbuh pesat: Kauman, Pudak. Daerah sedang tumbuh: Babadan, Jambon, Bungkal, Slahung, Sambit, Sawoo, Ngebel. Daerah berkembang: Ponorogo. Daerah tertinggal: Siman, Sukorejo, Sampung, Badegan, Balong, Ngrayun, Mlarak, Jetis, Pulung, Sooko.

Dari hasil perhitungan Indeks Williamson tahun 2016, 2017, 2018, 2019 kesemuanya menunjukkan angka mendekati 0, yang artinya pembangunan di Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan merata.

Indeks LQ tahun 2016 Sektor Basis: a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, b) Informasi dan Komunikasi, c.)Jasa Keuangan dan Asuransi, d) Real Estate, e) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, f) Jasa Pendidikan, g) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, h) Jasa Lainnya. Indeks LQ tahun 2016 Sektor non Basis: a) Pertambangan dan Penggalian, b) Industri Pengolahan, c) Pengadaan Listrik dan Gas, d) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, e) Konstruksi, f) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, g) Transportasi dan Pergudangan, h) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, i) Jasa Perusahaan.

Indeks LQ tahun 2017 Sektor Basis: a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, b) Konstruksi, c) Informasi dan Komunikasi, d) Jasa Keuangan dan Asuransi, e) Real Estate, f) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, g) Jasa Pendidikan, h) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, i) Jasa Lainnya. Indeks LQ tahun 2017 Sektor non Basis: a) Pertambangan dan Penggalian, b) Industri Pengolahan, c) Pengadaan Listrik dan Gas. d) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,

e)Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, f) Transportasi dan Pergudangan, g) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, h) Jasa Perusahaan.

Indeks LQ tahun 2018 Sektor Basis: a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, c) Konstruksi, d) Informasi dan Komunikasi, e) Jasa Keuangan dan Asuransi, f) Real Estate, g) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, h) Jasa Pendidikan, i) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, j) Jasa Lainnya. Indeks LQ tahun 2018 Sektor non Basis: a) Pertambangan dan Penggalian, b) Industri Pengolahan, c) Pengadaan Listrik dan Gas. d) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, e) Transportasi dan Pergudangan, f) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, g) Jasa Perusahaan.

Indeks LQ tahun 2019 Sektor Basis: a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, c)Konstruksi, d) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, e) Informasi dan Komunikasi, f)Jasa Keuangan dan Asuransi, g) Real Estate, h) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, i)Jasa Pendidikan, j) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, k) Jasa Lainnya.

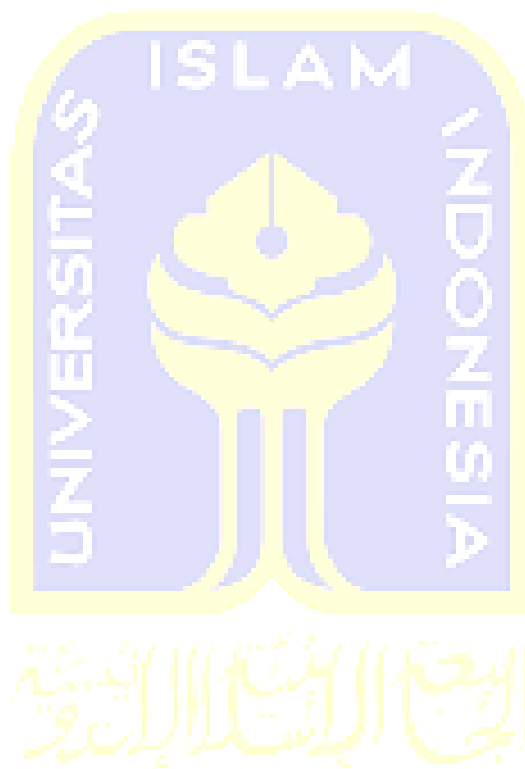
Indeks LQ tahun 2019 Sektor non Basis: a)Pertambangan dan Penggalian, b)Industri Pengolahan, c)Pengadaan Listrik dan Gas. d)Transportasi dan Pergudangan, e)Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, f)Jasa Perusahaan.

5.2 SARAN

Berdasarkan dari kriteria Klasen Tahun 2017 maka ada beberapa daerah wilayah yang masih tertinggal. Untuk daerah tertinggal disarankan dan didorong dengan berbagai program sektoral guna mengejar ketertinggalan dengan daerah lain dengan melihat kriteria LQ. Sedangkan Wilayah yang termasuk daerah sedang tumbuh dan daerah berkembang disarankan untuk menjadi daerah yang maju dan tumbuh pesat. Dan untuk daerah yang sudah maju disarankan untuk dipertahankan.

Kriteria Williamson Disarankan mempertahankan tingkat pemerataan yang telah dicapai selama ini. Dan Kriteria LQ Disarankan perlu komitmen tinggi untuk menjadikan sektor-sektor non basis menjadi sektor basis secara agregat dan kontinyu dari tahun ke tahun.

Untuk itu kami menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk lebih memperhatikan beberapa sektor ketertinggalan agar kecamatan-kecamatan tersebut bisa berkembang dan maju, untuk kecamatan yang sudah berkembang dan maju untuk dipertahankan dan dikembangkan lagi, serta pemerintah menentukan kebijakan khususnya dalam penanggulangan ketimpangan kecamatan di Kabupaten Ponorogo.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Amarudin. 1992. *Analisis of Regional Growth and Disparity: The Impact Analysis of The Projecton Indonesian Development*, University of Pennsylvania Philadelphia, USA.
- Arsyad, Licolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPF, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Astari Khairunnisa dan Paidi Hidayat. 2015. *Analisis Disparitas Pembangunan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan* .Vol.3 NO.7
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Sleman dalam Angka 2013*. Yogyakarta: BPS.
- Barika. 2012. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2005 - 2009*. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*. No.3, Vol.4.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPF, Yogyakarta.
- Caska dan Riadi, RM. 2007. *Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Daerah di Provinsi Riau*. *Jurnal Industri dan Perkotaan*, Vol.12.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Analisis Spasial dan Regional*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ketiga, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang)*, Jakarta: Penerbit Airlangga..
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. UUP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Kurniasih, Erni Panca. 2013. *Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet*, *Jurnal EKSOS*, Volume 9, Nomor 1, Hlm. 36-48.

- Kuznets, Simon. 1955. *Economic Growth and Income Inequality*. The American Economic Review. Volume XLV.
- Majidi, Nasyith. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*. Prisma, LP3ES.
- Mopanga, Herwin. 2011. Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo, *Trikonomika*, Volume 10, No. 1, Juni 2011, Hal. 40–51, ISSN 1411-514X.
- Mudrajad, Kuncoro. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Erlangga. Jakarta
- Pamrihnan, Ali, dan Malik Cahyadin. 2016. *Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Identifikasi Sektor Basis antar Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014*. JIEP-Vol. 16, No.2, 76.
- Restiatun. 2009. Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 10, Nomor 1, 77- 98.
- Sjafrizal. 2009. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, *Jurnal Buletin Prisma*, Jakarta.
- Sjafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma, LP3ES No. 3 Tahun XXVI. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Beberapa Aspek Dalam Pembangunan Daerah*, Cetakan Pertama, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijakan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Transformasi Ekonomi Indonesia*. Edisi I, Salemba Empat, Jakarta.
- Todaro. 2007. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga*, Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi, Jakarta: Erlangga.
- Wijaya M., Farid. 1990. *Ekonomika Makro*. Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Ying, Long. G. 2000. China's Changing Regional Disparities During the Reform Period, *Economic Geography*, Vol. XXIV No. 7. 59-70.

